

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara

Dengan diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jateng sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut dimulai dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel.

Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra periode 2013-2018. Renstra mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan.

Pembangunan Daerah ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme Dalam pelayanan di bidang ketenagakerjaan, ketrasmigrasian dan kependudukan berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan tahun 2015 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tahun 2013-2018. Sehingga pertanggungjawaban kinerja tersebut diwujudkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015 yang dilaksanakan secara berjenjang

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas pokok dan fungsi dinas Selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil;

- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil;
- 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, dan umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

Sekretaris mempunyai 3 subbagian :

1. Subbagian Program;
2. Subbag Keuangan;
3. Subbag Umum Dan Kepegawaian.

c. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan :

mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan kependudukan dan catatan sipil, dan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan kependudukan dan catatan sipil;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi administrasi kependudukan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempunyai 2 Seksi :

1. Seksi Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perluasan dan pengembangan tenaga kerja, dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perluasan dan pengembangan tenaga kerja;

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang transmigrasi;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempunyai 3 Seksi :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri;
2. Seksi Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja;
3. Seksi Transmigrasi.

e. Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas, membawahkan :

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang standarisasi dan sertifikasi, pelatihan dan pemagangan, dan produktivitas.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang standarisasi dan sertifikasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan pemagangan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produktivitas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempunyai 3 Seksi :

1. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi;
2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
3. Seksi Produktivitas.

f. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial;

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial, dan pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang syarat kerja dan jaminan sosial;

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan hubungan industrial;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempunyai 3 Seksi :
 1. Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 3. Seksi Pengupahan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

g. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempunyai 3 Seksi :

1. Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

3. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja UPTD adalah sebagai berikut:

a. Balai Latihan Kerja Industri Cilacap (BLKI Cilacap), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja industri. Untuk melaksanakan tugas Balai Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja industri;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja industri;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja industri;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Balai Latihan Kerja Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian;

- 3) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian;
 - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja luar negeri.

Balai Latihan Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri;
 - 3) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri;
 - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes (BPPKK dan Hiperkes) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes.

Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes;

- 3) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes;
 - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BP2TK) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan dan pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan dan pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja;
 - 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja;
 - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatrans Penca) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan transmigrasi dan penyandang cacat. Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan, pengarah dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan, peng arahan dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelatihan, peng arahan dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

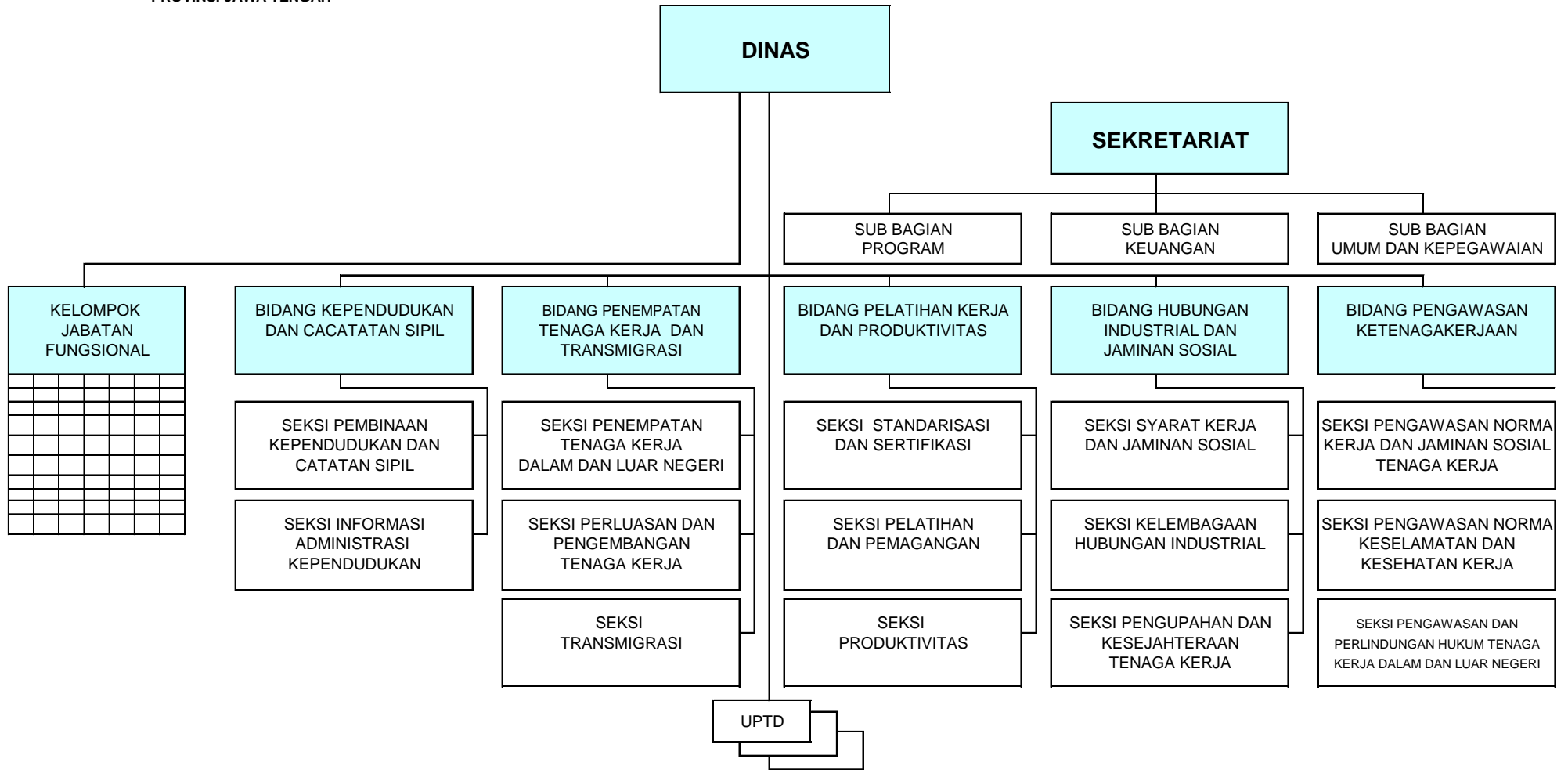
Balai Pelayanan Penyelesaian Perelisihan Tenaga kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut :

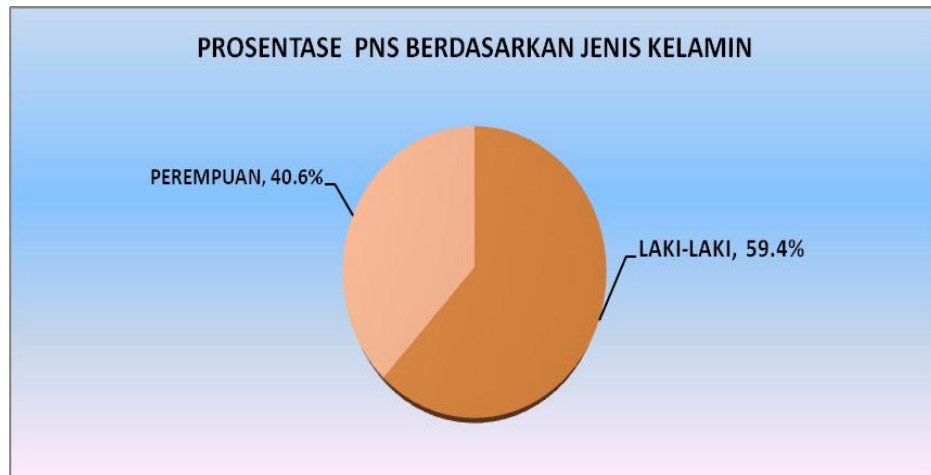
PROVINSI JAWA TENGAH
 (Perda Nomor : 6 Tahun 2008, Tgl. 7 JUNI 2008)
 Tentang :
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah didukung personil/pegawai sejumlah 411 orang.

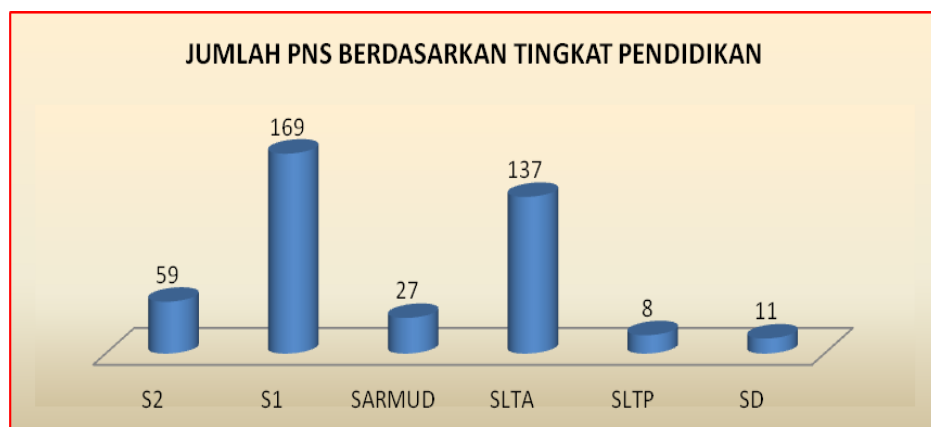
Daftar jumlah pegawai berdasarkan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan adalah sebagai berikut:

tabel 1.1
Sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



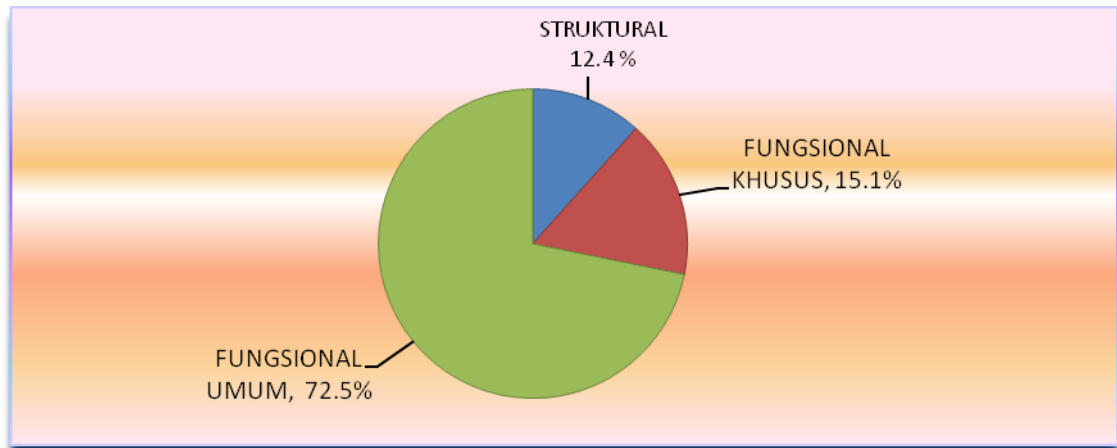
Berdasarkan berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki sebanyak 244 pegawai sedangkan perempuan sebanyak 167 pegawai

Tabel 1.2
Grafik 2. Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Berdasarkan jumlah pegawai sebanyak 411 orang dengan status tingkat pendidikan yang paling banyak adalah berpendidikan S1 sebanyak 41.1% atau sebanyak 169 orang.

tabel 1.3
Jumlah Jabatan Kepegawaian



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan sebaran pegawai di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan berdasarkan jenis jabatan jumlah pegawai fungsional umum sebanyak 298 pegawai, sementara jabatan pegawai fungsional khusus sebanyak 62 pegawai dan jabatan struktural sebanyak 51 pegawai

C. Aspek Strategis / Issu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Angka pengangguran masih cukup tinggi
- b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
- c. Dukungan personel yang kurang memadai dalam hal jumlah terutama personel yang berkaitan dengan pendataan tenaga kerja dan penempatan. Jumlah pegawai yang menangani penempatan/pengantar kerja sebanyak 12 orang hal ini tidak sebanding dengan jumlah penganggur yang membutuhkan fasilitasi penempatan.

- d. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan.
 - e. Jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/kuota yang diberikan dari Pusat (Kemenakertrans RI). Jumlah animo tahun 2015 sebanyak 1.109 KK, realisasi penempatan sebanyak 179 KK
 - f. Rendahnya kualitas Calon transmigran dan kurangnya penguasaan informasi terhadap calon lokasi transmigrasi.
2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
- Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:
- a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah sebesar 8.98 persen, lulusan SLTA sebanyak 3.30 persen sedangkan perguruan tinggi sebesar 1.15 persen
 - b. Berkurangnya Instruktur di BLK sebagai konsekuensi purna tugas, dari jumlah Instruktur 49 orang di tahun 2015.
 - c. Terbatasnya staf/pegawai yang dapat memahami SKKNI.
 - d. Terbatas fasilitasi kegiatan untuk UJK bagi Tenaga Kerja Indonesia
 - e. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/pedoman
 - f. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin
 - g. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:
- a. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
 - b. Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Ketenagakerjaan masih kurang;

- c. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
 - d. Belum ada pedoman dari pusat mengenai formula penetapan UMK;
 - e. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid di kabupaten/ kota
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
- Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu :
- a. Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum terlaksananya standarisasi K3 di tempat kerja;
 - b. Kurangnya pegawai pengawas KK baik pegawai pengawas KK umum maupun spesialis, jumlah pegawai pengawas se Jawa Tengah sebanyak 150 orang, tidak sebanding dengan jumlah perusahaan;
 - c. Masih banyaknya pekerja anak yang bekerja sektor informal yang berusia antara 10 – 17 tahun. Berdasarkan laporan Kabupaten / Kota jumlah pekerja anak tercatat sebanyak 319.234 di tahun 2014;
 - d. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan di sektor formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan belum sepenuhnya hak normatif tenaga kerja perempuan dilaksanakan. Penelitian di 70 perusahaan menunjukkan ada 3 kasus cuti hamil tidak diberikan gaji, 52 kasus gaji tidak diberikan secara utuh, hamil dipekerjakan malam hari 16 kasus, perbedaan pengupahan 19 kasus.
 - e. Belum adanya peraturan/regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan di sektor informal;
 - f. Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri dan kurangnya koordinasi kelembagaan penempatan TKI.

5. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terkait dengan target SPM Kab/Kota;
- b. Kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi/sector;
- c. Regenerasi dan dukungan SDM di daerah yang masih kurang optimal.

d. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 didasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat penjelasan umum mengenai Latar Belakang; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi , Aspek Strategis / Isu strategis serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

RPJMD Tahun 2013 – 2018, Memuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 s/d 2018 dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Tahun 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Identifikasi Capaian Kinerja organisasi tahun 2015; Analisa capaian kinerja dan Akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran)

BAB IV Pentup

Berisi tentang keimpulan dan saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Kependudukan bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

- a. Meningkatnya kompetensi, daya saing dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja
- c. Menurunnya jumlah penganggur
- d. Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan.
- e. Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di perusahaan
- f. Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- g. Meningkatnya Upah Minimum Kab/Kota (UMK)
- h. Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan
- i. Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
- j. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
- k. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- l. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015 telah menetapkan 4 program utama 49 kegiatan dan 8 program pendukung.

Kondisi ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kependudukan dan pencatatan sipil dengan adanya perubahan ekonomi yang tidak menentu seperti naiknya inflasi dan sisi lain investasi yang kurang berkembang berpengaruh turunnya tingkat pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja dan bertambahnya jumlah penganggur. Guna mengatasinya dibutuhkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Rencana Strategi RPJMD Tahun 2013 s/d 2018

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan

dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak **2013 s/d 2018**

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan yaitu :

a) Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa tengah Tahun 2013 - 2018 adalah :

**“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI”**

Dengan mengacu pada Visi Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Tahun 2013 – 2018 memiliki Visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA NAKERTRANS BERDAYA SAING,
HARMONIS, SELAMAT, SEJAHTERA DAN DUKCAPIL
TERTIB BERBASIS PELAYANAN PRIMA”**

b) Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sbb:
 1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
 2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;
 3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi;
 4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
 5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;

6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;
 8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk.
- Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan adalah, sebagai berikut
 1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
 2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;
 3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi;
 4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
 5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;
 6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;
 8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk.

c) Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja
2. Mengurangi tingkat pengangguran
3. Meningkatnya kualitas calon transmigran
4. Meningkatkan eksistensi peranan lembaga ketenagakerjaan
5. Meningkatkan upah tenaga kerja yang layak dan berkeadilan.
6. Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja

d) Sasaran Strategis

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Dengan indikator sebagai berikut :

- a) Produktivitas Tenaga Kerja
- b) Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
- c) Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (SPM);
- d) PDRB per tenaga kerja (dlm jutaan rupiah);
- e) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja;

2. Menurunnya jumlah penganggur

Dengan indikator sebagai berikut :

- a) Prosentase Tingkat Pengangguran terbuka;
- b) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja
- c) Prosentase besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan (SPM);
- d) Prosentase partisipasi angkatan kerja;

3. Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan

Dengan indikator sebagai berikut :

- a) Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU);
- b) Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi;

4. Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan

Dengan indikator sebagai berikut :

- a) Jumlah LKS Bipartit;
- b) Jumlah P P (Peraturan Perusahaan);
- c) Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama)

5. Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Dengan indikator sebagai berikut :

- a) Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(SPM),
 - b) Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI).
6. Meningkatnya Upah Minimum Kab/Kota (UMK)
 Dengan indikator sebagai berikut :
 Rasio Upah Minimum kab/Kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL)
7. Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan
 Dengan indikator sebagai berikut :
 a) Prosentase besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek (SPM);
 b) Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja
8. Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
 Dengan indikator sebagai berikut :
 a) Persentase besaran pemeriksaan perusahaan;
 b) Persentase besaran pengujian peralatan di perusahaan;
 c) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3;
 d) Jumlah angka kecelakaan kerja;
 e) Jumlah Penyakit Akibat Kerja (PAK);
 f) Rasio Perusahaan Zero Accident;
 g) Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan
9. Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak
 Dengan indikator sebagai berikut :
 Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)
11. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
 Dengan indikator sebagai berikut :
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
12. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Dengan indikator sebagai berikut :

- a. Rasio penduduk memiliki e-ktip per wajib e-ktip;
- b. Prosentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran;
- c. Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK;
- d. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk;
- e. Prosentase penduduk memiliki akte kematian;
- f. Rasio pasangan memiliki akta nikah

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan visi, misi dan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD akan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.0
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2013	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
							I	II	III	IV	IV	
							2014	2015	2016	2017	2018	
	Terwujudnya Nakertrans berdaya saing, harmonis, selamat, sejahtera dan Dukcapil Tertib berbasis pelayanan prima	1 Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja.	1 Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja	1 Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja.	1 % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	69.08	72.93	75.15	78.95	82.99	86.22	
					2 % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	73.26	77.71	83.82	87.28	88.33	89.05	
					3 % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	54.42	57.74	60.48	62.00	62.00	63.49	
					4 Produktivitas TK (dlm juta rupiah)	13.90	14.23	14.91	15.63	16.41	17.23	
					5 PDRB per tenaga kerja (dlm juta rupiah)	13.90	14.23	14.91	15.63	16.41	17.23	
					6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	38.48	37.27	36.08	34.91	33.77	32.68	
					7 % pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas	15.00	17.00	19,50	22.00	24,50	26.00	
					2 Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	1 % tenaga kerja yang disertifikasi	12,39	12,59	12,80	13,02	13,26	13,50

Tabel 2.0
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2013	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
							I	II	III	IV	IV
							2014	2015	2016	2017	2018
		2 Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja	2 Mengurangi tingkat pengangguran	3 Menurunnya Jumlah penganggur	1 % Tingkat Pengangguran Terbuka	6.02%	5,31-4,77	4,93-4,62	4,66-4,43	4,49-4,27	4,32-4,20
					2 % partisipasi angkatan kerja	70.72	72.27	72.58	72.90	73.22	73.55
					3 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	68.43	69.32	70.18	71.01	71.83	72.63
					4 % besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	42.00	51.33	60.67	70.00	78.06	86.11
					5 Jumlah penempatan AKAN	84,700	85000	85,300	85,500	81000	80000
		3 Meningkatkan kualitas Penempatan Transmigrasi	3 Meningkatkan kualitas calon transmigran	4 Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhandaerah penempatan	1 Jumlah KK Transmigran yg ditempatkan	471	150	200	200	200	200
					2 Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU);	540	200	275	300	250	200
					3 Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Prov.) dalam pengembangan kawasan transmigrasi	19	9	10	12	12	12
		4 Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.	4 Meningkatkan eksistensi peranan lembaga ketenagakerjaan	5 Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	1 Jumlah LKS Bipartit	1455	1555	1635	1695	1745	1795
					2 Jumlah P P (Peraturan Perusahaan)	3532	3752	4007	4277	4557	4857
					3 Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama)	782	790	800	810	820	830

Tabel 2.0
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2013	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun							
							I	II	III	IV	IV			
							2014	2015	2016	2017	2018			
				6 Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	1 % besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	88.33	87.72	88.42	88.57	88.81	89.09			
					2 Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI)	4000	3500	3000	2500	2000	1500			
		5 Meningkatkan kesejahteraan pekerja.	5 Meningkatkan upah tenaga kerja yang layak dan berkeadilan.	7 Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK)	1 Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL).	97,30	97,40	97,50	97,60	97,70	97,80			
		6 Meningkatkan perlindungan, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	7 Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, hygiene perusahaan, lingkungan.	9 Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	1 Rasio Perusahaan Zero Accident	0,98	1,12	1,31	1,43	1,50	1,60			
								2 % besaran pemeriksaan perusahaan	37.60	39.59	64.81	42.77	46.88	49.36
								3 % besaran pengujian peralatan di perusahaan	58,03 %	63,40 %	64,81 %	69,98 %	76,90 %	80,70 %
								4 Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	4.064	4.039	4.014	3.989	3.964	3.939
								5 Jumlah angka kecelakaan kerja	1945	1900	1850	1795	1735	1670
					6 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	1.833	1.868	1.908	1.953	2.003	2.058			
					7 Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja	19	18	17	16	15	14			

Tabel 2.0
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2013	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
							I	II	III	IV	IV
							2014	2015	2016	2017	2018
			8 Meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak serta kesetaraan dan keadilan gender	10 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	1 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	61,47 %	62,72 %	63,97 %	65,22 %	66,48 %	67,73 %
		11 Meningkatkan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak		2 Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)	38.231	36.481	35.481	35.431	35.381	35.331	
		7 Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.	9 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12 Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1 Rasio penduduk memiliki e- KTP per wajib e-KTP	85.00 %	100%	100%	100%	100%	100%
					2 Prosentase penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	31.49 %	45.00 %	55.00 %	65.00 %	70.00 %	80.00 %
					3 Jumlah Kabupaten/ Kota mengoperasikan SIAK	35	35	35	35	35	35
					4 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk		25%	40%	60%	60%	80%
					5 Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	10%	15%	20%	70%	80%	100%
					6 Rasio Pasangan yang memiliki Akta Nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.0
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2013	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
							I	II	III	IV	IV
							2014	2015	2016	2017	2018
		8 Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Nakertransduk	0 Meningkatkan kualitas sumberdaya pelayanan bidang Nakertransduk	13 Meningkatnya profesionalisme aparatur	1 Ratio Pegawai yang mengikuti Bintek	35%	35%	39%	43%	48%	50%
				14 Meningkatnya cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada penyelenggara pelayanan publik bidang Nakertransdu	1 Terbentuknya Unit Pelayanan Publik (UPP)	-	1 UPP	1 UPP	1 UPP	1 UPP	1 UPP
					2 Pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada UPP Dinakertransduk	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Dalam rencana kinerja Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
rencana kinerja Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja	1. PDRB per tenaga kerja (dlm juta rupiah)	14.91
	2. Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)	14.91
	3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	36.08
	4. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14,23
	5. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	14,23
	6. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	60.48
	7. % pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas	19.50
2. Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	% tenaga kerja yang disertifikasi	12,80
3. Menurunnya Jumlah penganggur	1. % Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93-4,62
	2. % partisipasi angkatan kerja	72.58
	3. rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	70.18
	4. % besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	60.67
	5. Jumlah penempatan AKAN	85,300
4. Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan	1. Jumlah Transmigran yg ditempatkan	200
	2. Jumlah KK calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	275
	3. Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi	10.
5. Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	1. Jumlah LKS Bipartit	1635
	2. Jumlah PP (Peraturan Perusahaan)	4007

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	3. Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama)	800
6.Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1. % besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (SPM)	88.42
	2. Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI)	3000
7.Meningkatnya Upah Minimum Kab. / Kota (UMK)	Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL).	97,50
8. Meningkatkan fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	1. % besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek (SPM)	75.65
	2. Jumlah penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	5.438
9. Meningkatkan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	1. Rasio Perusahaan zero accident	1.31
	2. % besaran pemeriksaan perusahaan	64.81
	3. % besaran pengujian peralatan di perusahaan	64,81
	4. Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	4.014
	5. Jumlah angka kecelakaan kerja	1850
	6. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	1.908
	7. Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja	17
10.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	63,97
11.Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)	35.481
12.Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP	100
	2. Prosentase penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	55.00
	3. Jumlah Kabupaten/ Kota mengoperasikan SIAK	35
	4. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	40
	5. Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	20
	6. Rasio Pasangan yang memiliki Akta Nikah	100

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Setelah melalau berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan Tahun 2015, mengalami perubahan.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja.

Adapun Penetapan Kinerja (PK) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja (PK)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGT	PROGRAM/KEG.	ANGGARAN
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Meningkatnya kompetensi, daya saing dan produktivitas tenaga kerja	PDRB per tenaga kerja (dlm juta rupiah)	14.91	1. Pelatihan Kerja bagi CTKI LN	645,000,000
	Produktivitas TK (dl juta rupiah)	14.91	2. Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM	380,680,000
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	36.08	3. Pelatihan dan Pemberdayaan Penca	620,565,000
	% pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas	19,50	4. Pemagangan dalam dan luar negeri	400,000,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGT	PROGRAM/KEG.	ANGGARAN
	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	75.15	5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pelatihan Kerja	300,000,000
	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)	83.82	6. Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS	350,000,000
	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (SPM)	60.48	7. Pengadaan sarana dan prasarana produktivitas	1,842,558,000
Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	% tenaga kerja yang disertifikasi	12,80	8. Peningkatan peran dan fungsi BLKP melalui ISO 9001 : 2008	69,320,000
			9. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	475,000,000
			10. Pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas	309,430,000
			11. Pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri	751,366,000
			12. Pemberdayaan Lembaga Produktivitas	425,000,000
			13. Uji Kompetensi, Identifikasi Data Pilah Responsif Gender yang Tersertifikasi dan Data Base Standarisasi dan Sertifikasi	250,000,000
			14. Peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	425,000,000
			15. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan /atau Daerah penghasil bahan baku industri hasil Tembakau	4,000,000,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGT	PROGRAM/KEG.	ANGGARAN	
			Pengembangan Kesempatan Kerja		
Menurunnya jumlah penganggur	% Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93-4,62	1. Pembinaan Masyarakat Penganggur Melalui Pengembangan Kewirausahaan	650,000,000	
	% partisipasi angkatan kerja	72.58	2. Pelayanan, penempatan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri	2,650,000,000	
	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	70.18	3. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	588,000,000	
	% besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	60.67	4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Prov. Jawa Tengah Tahun 2013-2018	98,020,000	
	Jumlah penempatan AKAN		85,300	5. Penyusunan Database Ketenagakerjaan	97,810,000
				6. Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKAD	394,500,000
				7. Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	373,000,000
				8. Penguatan Tata Kelola dan Perencanaan Bidang Nakertransduk	153,050,000
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan	Jumlah KK Transmigran yg ditempatkan	150	1 Pelatihan Transmigrasi	160,000,000	
	Jumlah KK calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU);	200	2 Penyiapan, Penempatan dan Peman-tapan Transmigrasi	550,000,000	
	Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi	9	3 Pemantauan Transmigran Pasca Penempatan	160,000,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGT	PROGRAM/KEG.	ANGGARAN
			Program perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	
Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK)	Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	97,50	1.Penetapan Upah Minimum	1,101,400,000
Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	% besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek	75.65	2.Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	587,475,000
	Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja.	5.438	3.Penanganan Kasus Kecelakaan Kerja /Jamsostek dan Penempatan TKI	133,200,000
Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	Rasio Perusahaan Zero Accident	75.65	4.Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri	378,700,000
	% besaran pemeriksaan perusahaan	75.65	5.Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/ SB	194,000,000
	% besaran pengujian peralatan di perusahaan	64,81	6.Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jamsos	151,800,000
	Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	4.014	7.Pembinaan syarat kerja dan Jaminan Sosial di dalam dan di luar Hubungan Kerja	280,980,000
	Jumlah angka kecelakaan kerja	1.850	8.Pengujian lingkungan sektor industri, ambient dan emisi stack	1,786,760,000
	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	1.908	9.Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan	234,285,000
	Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja	17	10. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja di Sektor Industri	245,800,000
	Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Jumlah LKS Bipartit	1.635	11. Pengembangan dan Akreditasi Laboratorium BPPKH Prov. Jateng

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGT	PROGRAM/KEG.	ANGGARAN
	Jumlah P P (Peraturan Perusahaan)	4.007	12. Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	239,950,000
	Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama)	800	13. Forum koordinasi LKS Tripartite	503,028,000
Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	% besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	88.42	14. Penyelesaian PHI / PHK / Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan	220,650,000
	Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI)	3.000	15. Pemantapan eksistensi lembaga / UPTD	90,000,000
			16. Penyelesaian kasus TKI bermasalah	127,650,000
			17. Pengembangan data base kasus ketenagakerjaan	105,700,000
			18. Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	170,575,000
			19. Peningkatan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Pekerja	197,765,000
			Program Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	275.000.000
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	63,97	1 Identifikasi data pilah gender bidang ketenagakerjaan yang berbasis gender.	67,000,000
			2 Desiminesi teknis Equal Employment Opportunity (EEO) di Perusahaan /tempat kerja	191,900,000
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan Anak	
Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)	35.48 1	1 Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Korban Trafficking penempatan tenaga kerja Prov. Jawa Tengah	116,000,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TGT	PROGRAM/KEG.	ANGGARAN
			2 Perlindungan Hak Normatif Pekerja Perempuan	72,000,000
			3 Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA)	877,200,000
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP	100	1.Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,335,160,000
	Prosentase penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	55.00	2.Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	777,270,000
	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	40	3.Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah	596,650,000
	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	20		
	Rasio Pasangan yang memiliki Akta Nikah	100		
	Jumlah Kabupaten/Kota mengoperasikan SIAK	35		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Tengah disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tenaga kerja, transmigrasi yang mandiri, dan berdaya saing dan sejahtera. Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mandiri berdaya saing yang bertumpu pada sumber daya daerah yang terjaga kelestariannya yang bertopang oleh insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, demokratis dan menjunjung tinggi hukum dalam negara kesatuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2013 – 2018.

Selanjutnya untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan mempunyai ukuran yaitu pembandingan antara perencanaan kerja dengan realisasi sehingga akan diketahui celah kinerja yakni selisih yang timbul akan dianalisa untuk memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Tabel. 3.0
Skala Penilaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 100	Sangat Baik
II	76 sampai 100	Baik
III	55 sampai 74	Sedang
IV	Kurang 55	Rendah

B. Analisa Capaian Kinerja

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja setiap indikator kinerja dan sasaran strategis dalam kurun waktu satu tahun. Hasil pengukuran kinerja pada setiap sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan program / kegiatan hingga akhir tahun 2015 , Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya kompetensi, daya saing dan produktivitas tenaga kerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Table 3.1
Pengukuran kinerja sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATAGORI
1. % Laju PDRB per tenaga kerja	14.91			
2. Produktivitas TK (dl juta rupiah)	14.91	49.16	329.71	Sangat Baik
3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	36.08	30.53	115.38	Sangat Baik
4. % pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas	19,50	21.74	111.49	Sangat Baik
5. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	75.15	85.15	113.31	Sangat Baik
6. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)	83.82	84.18	100.43	Sangat Baik
7. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (SPM)	60.48	70.48	116.53	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian			147.81	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran-1 Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja pada sasaran ini ada 6 indikator sasaran, berdasarkan capaian rata-rata dari 6 indikator kinerja hasil capaiannya melebihi target sebesar 147.81 persen dengan kategori **sangat baik**.

Pengukuran diatas terlihat bahwa, dari 6 indikator realisasinya melebihi target sedangkan ada 1 indikator yang capaiannya belum di rilis dari BPS.

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama tahun 2013 – 2015 terus mengalami penurunan atau kinerja yang semakin baik karena jumlah pekerja keluarga akan mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Penurunan ini mengindikasikan pergeseran dari pekerja informal ke pekerja formal, dan berdampak positif terhadap Hubungan Industrial yang semakin kondusif terlihat table berikut :

Table. 3.2.
Proporsi Tenaga Kerja dan Pekerja Keluarga
terhadap Total Kesempatan

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja
1	2013	38,48
2	2014	31,96
3	2015	30.53

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi target 75.15 persen terealisasi sebesar 85.15 persen atau 113.31 persen, Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan target 60.48 persen terealisasi sebesar 61.12 persen atau 101.06 persen dan tingkat produktivitas Tenaga Kerja target 14.91 persen terealisasi cukup besar karena adanya perubahan data pembagi dan pembilang dari BPS data capaian 49.16 persen atau 329.71 persen, sedangkan indikator Laju PDRB per tenaga kerja belum dirilis dari BPS.

Table. 3.3
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
1. PDRB per tenaga kerja (%)	14.23	14.91				
2. Produktivitas TK (dl juta rupiah)	14.23	14.91	49.16	329.71	17.23	285.32

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	31.96	36.08	30.53	84.62	32.68	93.42
4. % pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas	17.00	19,50	21.74	111.49	26.00	83.62
5. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	72.93	75.15	85.15	113.31	86.22	98.76
6. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)	77.71	83.82	84.18	100.43	89.05	94.53
7. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (SPM)	57.74	60.48	70.48	116.53	63.49	111.0
Rata-rata tingkat capaian				142.68		127.78

Realisasi kinerja rata – rata pada tahun 2015 jika dibanding dengan realisasi tahun 2014 secara umum meningkat, hanya ada satu indikator yang capaiannya menurun yaitu pada indikator persentase Laju PDRB per tenaga kerja. Jika diukur dengan target akhir rata-rata Renstra tahun 2013-2018 hasil indikator telah memberikan kontribusi 127.78 persen.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1 , diantaranya adalah :

1. Kurang proporsionalnya kondisi BLK, seperti peralatan pelatihan yang tersedia teknologinya masih ketinggalan, padahal teknologi dari waktu ke waktu semakin berkembang / maju
2. Masih rendahnya kamauan / sikap tenaga kerja untuk mengikuti program pelatihan kerja.
3. Lembaga pelatihan kerja sebagian besar di daerah perkotaan,
4. Terbatas fasilitasi kegiatan untuk UJK bagi Tenaga Kerja Indonesia
5. Terbatasnya jumlah Instruktur di BLK Dinas Nakertransduk Prov. Jateng, pada tahun 2015 jumlah instruktur sebanyak 49 orang

Oleh karena itu kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan
2. Peningkatan pengakuan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi kelembagaan pelatihan serta pengembangan Net Working pelatihan dan produktivitas

Keberhasilan pencapaian sasaran-1 dilaksanakan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adapun kegiatannya adalah :

Table. 3.4.
Kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pelatihan Kerja bagi CTKI LN	Jumlah tenaga trampil penata laksana Rumah tangga 150 orang	APBD
2. Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM	Jumlah tenaga trampil di Bidang Pertanian dan UKM 112 orang	APBD
3. Pelatihan dan Pemberdayaan Penca	Jumlah Penca yang terampil 150 orang	APBD
4. Pengadaan sarana dan prasarana produktivitas	Pengadaan di 5 UPTD	APBD
5. Fasilitasi pelatihan dan Pemagangan dalam dan Luar Negeri	Jumlah seleksi pemagangan di 400 orang	APBD
6. Pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas	Jumlah tenaga kerja terampil di-bidang 5S 80 orang	APBD
7. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau Daerah penghasil bahan baku industri hasil Tembakau	a. Jumlah pekerja yang memahami tentang SP/SB 270 orang b. Pembinaan Syaker 175 orang c. Rakor peningkatan kesja 210 orang d. Pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi 550 org / 9 pkt e. Pelatihan di bidang industri dan usaha mandiri bagi 160 orang f. Jumlah tenaga kerja terampil 400 orang	APBD
8. Pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri	Jumlah Calon TK yang berkompetensi dibidang industri 196 orang	APBD
9. Pendidikan Kemasyarakatan	a. Jumlah Naker yang berkompetensi d ibidang industri 420 orang / 21 paket b. Jumlah Naker yang berkompetensi dibidang pertanian sebanyak 192 orang /12 pkt	APBD

KEGIATAN	OUTPUT	KET
	c. Jumlah CTKI yang berkompentensi sebanyak 84 orang d. Jumlah Naker yang berkompentensi dibidang produktivitas sebanyak 650 orang / 26 paket e. Jumlah Naker Penca yang berkompentensi sebanyak 215 orang f. Pelatihan sebanyak 168 orang /4 paket g. Jumlah Naker yang produktivitas 200 orang / 8 paket h. Evaluasi Dikmas 1 paket	
10. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Pembinaan 3 Desa Produktif	APBN
11. Peningkatan penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	Pemagangan yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi 500 orang	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 6.189.121.110,- atau 96.6 persen dari total pagu sebesar Rp. 6.405.812.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3.4 persen dari Pagu yang ditentukan

2	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Table. 3.5
Pengukuran kinerja sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATAGORI
% tenaga kerja yang disertifikasi	12.80	14.80	115.63	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian			115.63	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran-2 Meningkatkan pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja pada indikatot capaian persentase tenaga kerja yang disertifikasi sebesar 14.80 persen atau 115.63 persen dengan kategori capaian **sangat baik**

Table. 3.6
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2015		Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	realisasi	% capaian		
% tenaga kerja yang disertifikasi	12.59	14.80	115.63	13.50	109.63
Rata-rata tingkat capaian			115.63		109.63

Capaian kinerja pada tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014 capaiannya menurun dari 12.39 persen menjadi 14.80 persen atau naik sebesar 2.21 persen. Rencana capaian akhir RPJMD tahun 2013-2018 atau besaran capaiannya target jangka menengah, pada tahun pertama 2015 telah memberikan kontribusi yang cukup besar 109.63 persen.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -2 , diantaranya adalah :

1. Adanya beban Biaya untuk pembuatan pembuatan sertifikat yang mahal
2. Kurangnya Informasi dari Pemerintah (LPJK) kepada tenaga kerja
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengakuan kompetensi dalam persaingan tenaga kerja

Keberhasilan pencapaian sasaran-2 dilaksanakan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adapun kegiatan adalah :

Table. 3.7
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Peningkatan peran dan fungsi BLKP melalui ISO 9001 : 2008	Kaji ulang manajemen mutu dan pelayanan di 1 UPTD	APBD
2. Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS	a. Jumlah instruktur yang mampu penyusunan program pelatihan 48 orang b. Jumlah instruktur yang mampu penyusunan CBT 25 orang c. Akreditasi dan penerapan KKNI dan SKKNI 50 LPK	APBD

KEGIATAN	OUTPUT	KET
3. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pelatihan Kerja	a. Jumlah pengelola LPKS yang berkualitas 90 orang b. Jumlah instruktur yang berkompetensi 60 orang	APBD
4. Peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	a. Jumlah instruktur yang berkompetensi 50 orang b. Sinkronisasi kelembagaan pelatihan dan produktifitas 140 org c. TUK sektor garmen di 4 Kab/Kota d. Bimtek Peningkatan manajemen TUK bagi 25 orang	APBD
5. Pemberdayaan Lembaga Produktivitas	a. Jumlah naker yang produktif sebanyak 100 orang b. Pembinaan kelembagaan produktifita 120 orang c. Forum komunikasi wirausaha produktif 5 kali d. Database desa produktif 1 data	APBD
6. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Jumlah pelaku usaha yang produktif dibidang sebanyak 150 orang b. Jumlah pelaku UMKM yang produktif sebanyak 40 orang c. Jumlah pelaku gerakan produktivitas di tempat kerja sebanyak 40 orang d. gerakan impelementasi produktifitas di tempat kerja 200 orang	APBD
7. Uji Kompetensi, Identifikasi Data Pilah Responsif Gender yang Tersertifikasi dan Data Base Standarisasi dan Sertifikasi	a. Jumlah TK yang bersertifikat 40 orang b. Identifikasi data pilah responsif gender yang tersertifikasi pada 4 perusahaan c. Tersedianya database 1 paket	APBD
12. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	Partisipasi Indonesia pada Kompetensi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN 50 orang	APBN
13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Peningkatan Kelembagaan 20 kelembagaan	APBN
14. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Pembinaan 3 Desa Produktif	APBN
15. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	Partisipasi Indonesia pada Kompetensi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN 50 orang	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-1, adalah sebesar Rp 786.884.550,- atau 92,57 persen dari total pagu sebesar Rp. 850.000.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.43 persen

3	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Menurunnya Jumlah penganggur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran-3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
1. % Tingkat Pengangguran Terbuka	4.96	4.99	99.40	Baik
2. % partisipasi angkatan kerja	72.58	67.86	93.50	Baik
3. rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	70.18	64.49	91.89	Baik
4. % besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	60.67	73.90	121.81	Sangat Baik
5. Jumlah penempatan AKAN	83.300	57.077	68.52	Sedang
Rata-rata tingkat capaian			95.02	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator sasaran “Menurunnya Jumlah penganggur”, sebagaimana dalam tabel...bahwa rata – rata prosentase capaian tahun 2015 sebesar 95.02% dengan kategori **baik**, namun perlu adanya upaya keras pada sasaran kinerja pada 4 indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan 3) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan 4). Jumlah penempatan AKAN. Berikut kendala atau permasalahan sebab tidak tercapai :

- jumlah lapangan kerja belum memadai, kompetensi naker masih rendah dan kurang sesuai kebutuhan pasar kerja;
- Jumlah penganggur di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 1.02 juta sebagian besar penganggur berusia muda antara 15–29 tahun. Jumlah ini sangat memprihatinkan terhadap kondisi angkatan kerja

- karena mengingat usia 15–19 tahun seharusnya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas
- meningkatnya jumlah angkatan tenaga kerja seiring dengan melemahnya daya serap tenaga kerja dari beberapa industry.
 - Adanya pemberlakuan pengetatan persyaratan penempatan TKI ke beberapa negara
 - Dari sektor industri yang melakukan PHK karena ketergantungan terhadap bahan baku impor disertai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut menambah beban biaya produksi sektor industri tersebut
 - Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja / ketrampilan tenaga kerja yang masih rendah
 - Semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja berumur 15 tahun
 - Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang masih belum tercapai disebabkan kompetensi calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan pertumbuhan ekonomi belum cukup berkualitas (masih di dorong dari sisi konsumsi)

Keberhasilan Indikator Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu 2013 – 2015 yang mengalami peningkatan, hal ini karena meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Kondisi jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada Tabel

Tabel. 3.9
Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2013	743.058	324.989	43,74
2014	426.435	305.134	71,55
2015	345.832	255.568	73,90

Table diatas dapat digambarkan bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar jumlahnya semakin menurun dan jumlah yang ditempatkan jumlahnya semakin meningkat dari tahun 2013 – 2015.

Berikut table yang menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2013- 2018

Table. 3.10
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	TARGET	capaian	%		
1. % Tingkat Pengangguran Terbuka	5.68	4.96	4.99	99.40	4.04	76.49
2. % partisipasi angkatan kerja	69.68	72.58	67.86	93.50	73.55	92.26
3. rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	65.72	70.18	64.49	91.89	72.63	88.79
4. % besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	71.55	60.67	73.90	121.81	86.11	85.82
5. Jumlah penempatan AKAN	92.587	83.300	57.077	68.52	80.000	71.35
Rata-rata tingkat capaian				95.02		82.94

Capaian kinerja pada sasaran **Menurunnya Jumlah penganggur** sampai dengan tahun 2015 sebesar 95.02 persen jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2013-2018 telah memberikan kontribusi yang masih kecil sebesar 82.94 persen

Capaian kinerja pada sasaran diatas tercapai bila dibandingkan tahun 2014, dimana angkatan kerja di Jawa Tengah Agustus 2015 sebanyak 17,30 juta orang, turun sekitar 248 ribu orang dan berkurang 994 ribu orang dibanding Februari 2015. Penduduk yang bekerja di Jawa Tengah pada Agustus 2015 sebesar 16,44 juta orang, berkurang sekitar 116 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2014 dan berkurang sekitar 887 ribu orang dibandingkan Februari 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah Agustus 2015 sebesar 4,99 persen, mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin dibanding TPT Agustus 2014 (5,68

persen) dan mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin dibandingkan TPT Februari 2015 (5,31 persen)

Pencapaian kinerja sasaran-3 Tahun 2015 dibanding tahun 2014 mengalami peningkatan disebabkan antara lain :

1. Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terdidik, kompetensi dan terampil melalui pembinaan dan pelatihan
2. Bertambahnya jaringan elektronik melalui website yang berkaitan dengan informasi kerja
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas balai pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan teknologi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi atau menginformasi yang berkaitan dengan lapangan atau peluang kerja melalui kerjasama dengan Provinsi lain atau pihak-pihak swasta ataupun luar negeri
2. Mengadakan pembinaan atau pelatihan kerja di lembaga-lembaga pelatihan atau BLK. Ini diperlukan terkhusus para tenaga kerja yang tidak mempunyai ketrampilan atau yang tidak sempat atau tidak mampu menimba ilmu di sekolah-sekolah formal, sehingga dapat memiliki keterampilan khusus yang diperlukan
3. Memfasilitasi para pencari kerja memperoleh akses informasi pasar kerja, telah dibangun pusat-pusat informasi dan bursa kerja terus dioptimalkan. Pusat layanan informasi itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Beberapa pusat informasi pelayanan ketenagakerjaan yang sudah dibangun di 35 kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan tenaga kerja, penempatan melalui antarkerja lokal (AKL) dan Antar kerja antardaerah (AKAD) serta antar Antar Negara (AKAN)
4. menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri dimulai sejak rekrutmen, penempatan, dan kembali ke tanah air

- Memberi pelayanan penempatan TKI Deportasi khususnya di sejumlah wilayah perbatasan sekaligus mengantisipasi deportasi TKI illegal

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelatihan dan produktivitas

Keberhasilan pencapaian sasaran-3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program

- Program Pengembangan Kesempatan Kerja
- Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pelaksanakan Kegiatan :

Table. 3.11
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pembinaan masy penganggur melalui pengembangan kewira-usahaan	Pelatihan dibidang Usman, CBT, Green entrepreneur, SI 250 orang	APBD
2. Pelayanan Penempatan, Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri	Pelayanan, penempatan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja 4.560 orang	APBD
3. Penyebarlusan Informasi Pasar Kerja	5 paket (Jumlah loker melalui Website BKO Disnakertransduk Prov Jateng 1 paket, lowongan melalui JMF 1 paket, Pemanduan dan pembinaan BKK 40 perusahaan, Penyuluhan Bimbingan Jabatan 400 siswa, Pengumpulan dan pengolahan data IPK di 35 Kab/kota	

KEGIATAN	OUTPUT	KET
4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018	Data penanganan ketenagakerjaan Jateng 1 dokumen	APBD
5. Penyusunan Database Ketenagakerjaan	Buku data ketenagakerjaan 50 buku	APBD
6. Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN	Jumlah TK AKAD yang siap ditempatkan di Provinsi lain 500 orang, Peluang kerja di sektor formal di 4 Provinsi	APBD
7. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Jumlah perusahaan yang memahami tentang peraturan penggunaan TKA 150 orang, Pengendalian penggunaan TKA melalui verifikasi dan klarifikasi 70 perusahaan	APBD
8. Penguatan Tata Kelola dan Perencanaan Bidang Nakertransduk	Dokumen perencanaan bidang Nakertransduk 1 dokumen	APBD
9. Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri	a. Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja di 8 lokasi b. Peningkatan Kapasitas Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja 105 orang	APBN
10. Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja 39 orang	APBN
11. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Penempatan TKLN berdasarkan Okupasu di 3 lokasi	APBN
12. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	a. Penciptaan WUB melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 16 paket b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Produktif 8 paket c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri untuk Penciptaan Wirausaha Baru 1.060 orang d. Pemberdayaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Sarjana melalui Penugasan Pendampingan Masyarakat 95 orang e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan TTG 220 orang	APBN
13. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	Pembinaan dan Pembangunan Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota di 36 lokasi	APBN

KEGIATAN	OUTPUT	KET
14. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-3, adalah sebesar Rp 9.394.724.914,- atau 95.6 persen dari total pagu sebesar Rp. 9.830.664.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4.4 persen dari Pagu yang ditentukan

4	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatkan kualitas calon transmigran

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas calon transmigran indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.12
Pengukuran kinerja sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1. Jumlah KK Transmigran yg ditempatkan	200	179	89.50	Baik
2. Jumlah KK calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	275	80	29.09	Kurang
3. Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi	10	12	120	Sangat Baik
Rata – rata tingkat capaian			79.53	Baik

Dari hasil pengukuran 3(tiga) indikator kinerja sasaran Meningkatkan kualitas calon transmigran”,diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 79.53 % atau dikategori **Baik**.

Kategori sasaran meningkatnya kualitas calon transmigran pada indikator kinerja Jumlah KK Transmigran yg ditempatkan target 200 KK terealisasi sebesar 179 KK atau 89.50 persen dan Jumlah KK calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) tercapai 29.09 persen, tidak tercapai 100 persen hal ini di sebabkan karena :

1. Kebijakan Pemerintah Pusat karena Perubahan nomenkatur Kementerian menyebabkan rendahnya penempatan transmigrasi dan

SPP yang dikeluarkan dari Pusat terbit di akhir tahun anggaran sehingga tidak sempat dilakukan pelatihan bagi calon transmigran

2. kurang siapnya daerah penempatan
3. Adanya pengetatan seleksi calon transmigrasi yang hendak diberangkatkan
4. Alokasi anggaran dari Pusat yang terfokus untuk peningkatan sarana prasarana infrastruktur di lokasi di daerah transmigrasi sehingga target penempatan keseluruhan dari pusat menurun, sehingga kuota penempatan transmigrasi Jawa Tengah tidak tercapai.

Table. 3.13
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
1. Jumlah KK Transmigran yg ditempatkan	122	200	179	89.50	950	31.68
2. Jumlah KK calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	105	275	80	29.09	1.250	14.80
3. Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi	6	10	12	120	55	32.73
Rata-rata tingkat capaian				79.53		26.40

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 sebesar 79.53 persen jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2013-2018 telah memberikan kontribusi yang masih kecil sebesar 26.40 persen

Jumlah transmigran dari Jawa Tengah selama periode 2013-2015 terus mengalami penurunan. Salah satu upaya meningkatkan penempatan transmigran dilakukan melalui mekanisme transmigrasi *sharing* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan daerah penerima transmigran khususnya pada tahun 2016 dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, berikut perkembangan jumlah animo transmigran dan jumlah penempatan tahun 2013 – 2015

Table. 3.14
Animo dan penempatan transmigrasi 2013 - 2015

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2013	4.760	540	471	9,89
2	2014	3.624	142	122	3,36
3	2015	1.109	239	179	16,14
Jumlah		21.496	2.571	2.162	

Indikator Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) tercapai 80 orang atau menurun dibanding dengan tahun 2014 sedang Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi mengalami kenaikan sebesar 50 persen atau tercapai 12 provinsi

Adapun solusi yang telah dilakukan tidak tercapainya pada dua indikator tersebut diatas akan berpengaruh berdampak pada jumlah penempatan transmigrasi tidak sesuai target. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui koordinasi dengan pemerintah Pusat sebagai yang pemberi kuota jumlah penempatan dan juga melaksanakan MOU atau kerjasama dengan daerah penempatan :

Pencapaian pada sasaran ini dilaksanakan melalui program :

- a. Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan
- b. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
- c. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan

Table. 3.15
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pelatihan Transmigrasi	pelatihan catrans 35 KK/ 70 orang	APBD
2. Fasilitasi penyiapan, penempatan dan pematapan transmigrasi	a. Koordinasi program trans dengan 35 Kab./koata b. Rintisan kerjasama dengan 35 Kab/kota c. Rintisan dan penjajagan kerja-sama antar daerah di 10 Prov.	APBD

KEGIATAN	OUTPUT	KET
	d. Pemantapan KSAD bidang trans 10 Provins	
3. Pemantauan Transmigran pasca penempatan	Evaluasi paska penempatan transmigrasi di 6 Provinsi	APBD
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKP2T	Pelayanan Teknis dan Administratif 1 Satker	APBN
5. Penataan Persebaran Penduduk	Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	APBN
6. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	Kerjasama Antar Daerah	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-4, adalah sebesar Rp 4.105.033.887,- atau 54.06 persen dari total pagu sebesar Rp. 7.593.107.000, Hal ini berarti terdapat sisa anggaran sebesar 45.94 persen dari sub kegiatan Fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi yang fisiknya tidak 100 persen

5	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan

Pengukuran Kinerja Sasaran **Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan** indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.16
Pengukuran kinerja sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
1. Jumlah LKS Bipartit	1635	1.639	100.24	Sangat Baik
2. Jumlah PP (Peraturan Perusahaan)	4007	4.009	100.05	Sangat Baik
3. Jumlah PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	800	801	100.13	Sangat Baik
Rata – rata tingkat capaian			100.14	Sangat Baik

Secara umum capaian indikator pada sasaran-5. Meningkatkan peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan mencapai 100.14 persen atau sesuai target dengan kategori sangat baik, melalui 3 indikator yaitu peningkatan Jumlah LKS Bipartit melebihi target yaitu

100.24 atau kategori **sangat baik**, dengan masing-masing LKS bipartit atau tercapai 100.24 persen dari target 1.555, sedangkan pada indikator Jumlah PP (Peraturan Perusahaan) terealisasi sesuai target sebesar 100.05 PP atau tercapai 103.4% dari target 3.752 PP, dan pada indikator peningkatan peningkatan Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama) tercapai sesuai target yaitu 100.13 persen

Table. 3.17
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
1. Jumlah LKS Bipartit	1644	1635	1639	100.24	1795	91.31
2. Jumlah PP (Peraturan Perusahaan)	3.881	4007	4009	100.05	4857	82.54
3. Jumlah PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	802	800	801	100.13	830	96.51
Rata-rata tingkat capaian				79.53		90.12

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 jika dibanding dengan realisasi kinerja tahun 2014 dari 3 indikator mengalami kenaikan. Kalau dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Renstra tahun 2013-2018 pada tahun kedua telah memberikan kontribusi yang cukup besar 90.12 persen

Penyebab tercapaian sasaran kinerja Tahun 2015 pada indikator peningkatan Jumlah LKS Bipartit dan peningkatan Jumlah P P (Peraturan Perusahaan) , dan Jumlah P K B (Perjanjian Kerja Bersama) disebabkan semakin bertambahnya perusahaan besar di Jawa Tengah, hal ini terlihat pada tahun 2015 jumlah perusahaan meningkat sebesar 8 persen dibanding tahun 2014, disamping itu juga mengacu pada UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya tentang perusahaan yang tergolong skala besar yang mempekerjakan pekerja/buruh sebanyak 50 orang atau lebih, wajib membentuk LKS bipartit

Keberhasilan pencapaian sasaran 5. sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, dengan kegiatan :

Table. 3.18
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/ SB	a. Pemberdayaan LKS Bipartit 10 lokasi, , b. Koordinasi LKS Bipartit 300 orang c. Rakor teknis mediator 80 orang	APBD
2. Forum koordinasi LKS Tripartite	a. Rakor pemberdayaan Tripartit 12 kali b. Penilaian kinerja LKS tripartit Kab/kota 105 orang c. Forum koordinasi LKS Tripartit Provinsi dengan Kab/kota 140 orang d. Rakor pemberdayaan LKS Tripartit 27 orang	APBD
3. Pemantapan eksistensi lembaga / UPTD	cetak iklan 1 paket, cetak brosur 1000 eksemplar	APBD
4. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	a. Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang diberdayakan 50 orang b. SDM yang memahami Hubungan Industrial 120 orang c. Peningkatan kapasitas Pengurus SP/SB 30 orang d. Pemasyarakatan, TOT, Konsolidasi, Sosialisasi, Bimtek 80 orang	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp. 2.164.967.340,- atau 77.89 persen dari total pagu sebesar Rp. 2.779.564.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22.11 persen dari Pagu yang ditentukan

6	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.19
Pengukuran kinerja sasaran 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
1. % besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (SPM)	88.42	90.79	102.68	Sangat Baik
2. Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI)	3.000	2.301	123.30	Sangat Baik
Rata – rata tingkat capaian			112.99	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran-6 Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dari 2 indikator kinerja capaian rata-rata sebesar 112.99 persen dengan kategori **sangat baik**, sebagai tolak ukurnya adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dari target 88.42 persen tercapai 90.79 persen atau 102.68 persen sedangkan pada indikator Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI) tercapai cenderung menurun atau positif dari target 3.000 kasus menjadi 2.301 kasus atau tercapai melebihi target sebesar 123.30 persen.

Table. 3.20
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
1. % besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (SPM)	80.04	88.42	90.79	102.68	89.09	109.91
2. Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial (HI)	2.712	3.000	2.301	123.30	1.500	46.60
Rata-rata tingkat capaian				112.99		74.25

Capaian kinerja sampai pada tahun 2015 jika dibanding dengan realisasi kinerja tahun 2014 dari 2 indikator mengalami kenaikan yang positif atau jumlah kasus yang semakin menurun. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Renstra tahun 2013-2018 pada tahun ke 2 telah memberikan kontribusi yang cukup besar 74.25 persen. dari indikator

besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dan Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial. berikut data Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial

Table. 3.21
kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2013	4.000	100% terselesaikan
2	2014	2.712	100% terselesaikan
3	2015	2.301	100% terselesaikan

Penyebab meningkatnya capaian kinerja Tahun 2015, pada terjadinya kasus dan penyelesaian penurunan kasus disebabkan karena :

- 1) meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2) meningkatnya kinerja pengawas ketenagakerjaan
- 3) meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keberhasilan pencapaian sasaran 6. sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dilaksanakan dengan kegiatan :

Table. 3.22
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

NO	KEGIATAN	OUTPUT	KET
1	Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri	a. Pengawasan dan pemerik-saan 100 perusahaan cabang PPTKIS, LPTKS b. Pemahaman aparat / pemangku kepentingan trhp prosedur penempatan TKI ke LN bagi 240 org c. Pengawasan 60 perusahaan pengguna TKA d. Pengawasan 50 perusahaan pengguna TK penca	APBD
2	Penanganan Kasus Kecelakaan Kerja / Jamsostek dan Penempatan TKI	Pemeriksaan kasus kecekaan kerja 40 kasus	APBD
3	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	a. Sosialisasi penanggulangan TK AKAD 6 Kab/Kota, b. TKI dideportasi 180 orang	APBD

NO	KEGIATAN	OUTPUT	KET
		c. monitoring TK bermasalah di 3 Provinsi	
4	Fasilitasi Penyelesaian PHI / PHK /Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan	a. Jumlah kasus PHI/PHK di 37 kasus, penanganan 10 kasus keluh kesah, b. Pencegahan PHI/PHK di 38 perush c. Bimtek pelaku proses produksi 30 orang	APBD
5	Fasilitasi Penyelesaian kasus TKI bermasalah	a. Jumlah kasus TKI ditangani 100% (44 kasus), b. Jumlah kasus TKI bermasalah di daerah embarkasi /debarkasi ditangani 100% (121 kasus) jumlah data TKI dideportasi	APBD
6	Pengembangan data base kasus ketenagakerjaan	1 dokumen data kasus ketenagakerjaan	APBD
7	Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	a. Pengawasan UMK dan THR di 525 perusahaan di 35 kab.kota b. Pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di 275 perus di 35 kab/kota	APBD
8	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	a. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan Hubungan Industrial 250 kasus b. Sosialisasi Tata Cara Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 150 orang	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp. 2.299.756.916,- atau 79.70 persen dari total pagu sebesar Rp. 2.885.605.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20.30 persen dari Pagu yang ditentukan.

7	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK)

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.33
Pengukuran kinerja sasaran 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	97.50	100.33	102.90	Sangat Baik
Rata – rata tingkat capaian			102.90	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, yang berkaitan dengan Meningkatnya Upah Minimum Kab. / Kota (UMK) di Jawa Tengah pada indikator kinerja persentase Upah Minimum Kab / kota terhadap Kebutuhan Hidup Layak /KHL tercapai melebihi target sebesar 101.6 persen atau kategori **sangat baik**.

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak. Perkembangan rasio UMK kabupaten/kota dibandingkan KHL di Jawa Tengah tahun 2013-2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel

Table. 3.34
rasio UMK kabupaten/kota dibandingkan KHL di Jawa Tengah
tahun 2013-2015

No	Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
1	2013	914.275,68	940.375	97,30
2	2014	1.066.603,43	1.077.793,30	98,96
3	2015	1.220.073,32	1224.532,43	100,33

Hasil pengukuran kinerja di atas jumlah besaran target penetapan UMK sesuai KHL tahun 2015 target 97.50 persen tercapai sebesar 100.33 persen atau 102.90 persen. jika dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah UMK di Jawa tengah meningkat sebesar Rp. 156.724 atau 14.7 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL)

Table. 3..35
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	97.40	97.50	100.33	102.90	97.80	102.59
Rata-rata tingkat capaian				102.90		102.59

Peningkatan Upah Minimal pada Tahun 2015 disebabkan karena adanya kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terjadi pada setiap tahun dan berkaitan pula seiring dengan terjadinya inflasi dan bertambahnya jumlah cakupan kebutuhan hidup layak (KHL).

Keberhasilan pencapaian sasaran-7 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial melalui kegiatan :

Table. 3.36
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
Penetapan Upah Minimum	a. Jumlah yang memahami penetapan UM tahun 2016 80 orang	
	b. Penagguhan UM tahun 2016 42 orang	
	c. Rakor pengupahan 145 orang	
	d. Survai usaha marginal 390 orang	
	e. Survai KHL 980 orang	
	f. Sidang pembahasan UM 400 orang	
	g. Koordinasi dan konsultasi masalah pengupaham 350 orang	
	h. Jumlah yang memahami penetapan UM tahun 2016 80 orang	

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-7, adalah sebesar Rp . 1.050.174.850,- atau 95.35 persen dari total pagu sebesar Rp. 1.101.400.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,65 persen dari Pagu yang ditentukan

8	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja

Pengukuran Kinerja Sasaran Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.37
Pengukuran kinerja sasaran 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
1. % besaran pe-kerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek (SPM)	75.65	89.39	118.16	Sangat Baik
2. Jumlah perusahaan penyedia fasili-tas kesejahteraan tenaga kerja	5438	5.438	100	Baik
Rata – rata tingkat capaian			109.08	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, yang berkaitan dengan Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja tercapai melebihi target sebesar 109.08 persen atau kategori **sangat baik**

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya sebagai berikut :

Data capaian yang berkaitan dengan tujuan 6. Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja pada sasaran Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan tercapai sesuai target yang direncanakan. Untuk capaian indikator peningkatan Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja terealisasi 100% peningkatan besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek (SPM) terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu terealisasi sebesar 89.39 persen dari target 75.65 persen sehingga capaian kinerja tercapai 118.16 persen, Data kepesertaan dari berbagai perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2013 – 2015 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenaga-kerjaan semakin meningkat

Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2015, disebabkan oleh karena

- 1) Dorongan pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek

- 2) Cukup intensnya sosialisasi kepada tenaga kerja berkaitan dengan program jamsostek tentang haknya untuk mendapatkan perlindungan
- 3) Program jamsostek mempunyai 3 pilihan perlindungan
- 4) Meningkatnya upah / pendapatan tenaga kerja
- 5) Semakin bertambahnya jumlah perusahaan di Jawa Tengah

Table. 3.38
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
1. % besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek (SPM)	72.87	75.65	89.39	118.16	81.64	109.49
2. Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja	4.350	5438	5.438	100	10.620	51.21
Rata-rata tingkat capaian				112.99		80.35

Capaian kinerja sampai pada tahun 2015 jika dibanding dengan realisasi kinerja tahun 2014 dari 2 indikator mengalami kenaikan. Kalau dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Renstra tahun 2013-2018 pada tahun ke 2 telah memberikan kontribusi yang cukup besar 80.35 persen. dari indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dan Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial. Berikut Perkembangan rasio UMK kabupaten/kota dibandingkan KHL di Jawa Tengah tahun 2013-2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel

Table. 3.39
Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	2013	22.247	1.249.235
2	2014	22.630	1.249.434
3	2015	25.395	1.198.925

Keberhasilan pencapaian tujuan-6 pada sasaran Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan dilaksanakan program Perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan kegiatan :

Table. 3.40
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pembinaan syarat kerja dan Jaminan Sosial di dalam dan di luar Hubungan Kerja	a. Pemb. Syaker dan jamsos outsourcing 245 orang b. Sosialisasi kepesertaan Jamsostek terhadap Tenaga Kerja Dalam Hub. Kerja (TKDHK) dan TKLHK 210 orang	APBD
2. Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jamsos	a. Rakor pendataan HI dan Jamsos 4 kali b. Bimtek pendataan HI dan Jamsos 95 orang c. Data Hubungan industrial dan jamsos 35 kab/kota	APBD
3. Peningkatan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Pekerja	a. Koordinasi dan konsolidasi dan studi banding 185 stakeholder b. Dokumen data kesejahteraan pekerja di 35 Kab/kota 1 dokumen	APBD
4. Peningkatan Penerapan Pengupahan Jaminan Sosial Tenaga kerja	Jumlah yang mengikuti Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek 100 orang	APBN
5. Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	a. Jumlah yang di Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh 150 orang b. Peningkatan Kapasitas Pelaku HI tentang Tata Cara Pembuatan PK, PP dan PKB 60 orang c. Sosialisasi Non Diskriminasi di Tempat Kerja 50 orang	
6. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	a. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 10 paket b. Laporan monitoring dan evaluasi 10 laporan c. Layanan Perkantoran 10 bulan	APBN
7. Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek 100 orang	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-8, adalah sebesar Rp . 2.128.351.325,- atau 74.76 persen dari total pagu sebesar Rp. 2.846.845.000, Penggunaan sumber dana sisa sebesar 25.24 persen dari Pagu yang ditentukan karena ada sisa atau efesiensi pada pada sub kegiatan Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek

9	Pengukuran Kinerja Sasaran
	meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan

Pengukuran Kinerja Sasaran meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.41
Pengukuran kinerja sasaran 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
1. Rasio Perusahaan Zero Accident	1.31	1.37	95.42	Baik
2. % besaran pemeriksaan perusahaan	64.81	52.05	80.31	Baik
3. % besaran pengujian peralatan di perusahaan	64.81	64.00	98.75	Baik
4. Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	4.014	2.611	134.95	Sangat Baik
5. Jumlah angka kecelakaan kerja	1.850	3.083	33.35	rendah
6. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	1.908	1920	100.63	Sangat Baik
7. Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja	17	0	100	Baik
Rata – rata tingkat capaian			91.92	Baik

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari 7 indikator kinerja rata-rata tingkat capaian sebesar 91.92 persen dengan kategori **baik**, Adapun capaian kinerja ada pada indikator Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan, hal ini terjadi penurun yang signifikan atau positif sebesar 2.541 pelanggaran atau 137.1% dari target jumlah kejadian sebanyak 4.039 pelanggaran, untuk capaian kinerja meningkatnya besaran pemeriksaan perusahaan tercapai 52.05%, sedikit dibawah

target yang telah ditetapkan yaitu 64.81% tercapai 80.31%. Sementara itu untuk capaian kinerja Jumlah angka kecelakaan kerja yang terjadi cukup tinggi yaitu 3083 kecelakaan, atau tercapai kurang dari target sebesar 1850 kejadian atau tercapai (33.35%),

Table. 3.42
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
1. Rasio Perusahaan Zero Accident	1.18	1.31	1.37	95.42	1.60	85.63
2. % besaran pemeriksaan perusahaan	39.63	64.81	52.05	80.31	49.36	105.45
3. % besaran pengujian peralatan di perusahaan	63.40	64.81	64.00	98.75	80.70	79.31
4. Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	2.541	4.014	2.611	134.95	3939	133.71
5. Jumlah angka kecelakaan kerja	2.951	1.850	3.083	33.35	1.670	15.39
6. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	2.091	1.908	1.920	100.63	2085	92.09
7. Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja		17	0	100	14	
Rata-rata tingkat capaian				91.92		74.25

Apabila dibanding capaian kinerja tahun 2014 Capaian kinerja Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan terjadi kenaikan yang signifikan atau negatif sebesar 2.611 pelanggaran atau 137.1% dari target jumlah kejadian sebanyak 2.541 pelanggaran, untuk capaian indikator kinerja meningkatnya besaran pemeriksaan perusahaan jumlahnya meningkat menjadi 52.05%, Sementara itu untuk capaian kinerja kinerja Jumlah angka kecelakaan kerja yang terjadi cukup tinggi yaitu 3.083 kecelakaan, atau tercapai kurang dari target sebesar 1.850 kejadian atau meningkat dari tahun 2014

Tidak tercapainya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan :

- 1) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak
- 2) Penggunaan mesin dan alat elektronik tanpa pengaman yang baik

- 3) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya
- 4) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya
- 5) Penerangan yang tidak memadai

Adapun solusi untuk mengurangi angka kecekaan kerja antara lain :

- 1) Pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja sebelum mereka memulai tugasnya, tujuannya agar mereka mentaatinya
- 2) Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada para buruh secara kontinu agar mereka tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya
- 3) Pemeriksaan kesehatan berkala/ulangan, yaitu untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan pada pekerja

Pencapaian tujuan pada sasaran Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan kegiatan :

Table. 3.43
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja di Sektor Industri	a. Data hasil uji lingk kerja di 39 perush b. Jumlah tenaga kerja yang diperiksa 1.784 c. Identifikasi dan penilaian resiko bahaya K3 bagi 75 orang	APBD
2. Pengujian lingkungan sektor industri, ambient dan emisi stack	Pengujian lingkungan sektor Industri dan pemeriksaan tenaga kerja 232 perusahaan	APBD
3. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan	a. Pelatihan 60 dokter b. pelatihan 11 paramedis c. pelatihan 30 teknis / supervisor	APBD

KEGIATAN	OUTPUT	KET
	d. Pelatihan dan sertifikasi 25 pencaker dibidang hiperkes dan KK e. 1 TUK dibidang K3	
4. Pengembangan dan Akreditasi Laboratorium BPPKH Prov. Jateng	a. Kaji ulang 4 dokumen b. Pengujian kualitas udara lingkungan 8 metoda c. Uji performance spektrofotometer 1 kali d. kalibrasi alat laboratorium 15 kali e. Kaji ulang manajemen 1 kali pertemuan f. Pertemuan teknis laboratorium 1 kali g. Koordiansi ke lab. Terakreditasi , 2 kali	APBD
5. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	a. Pembinaan dan pengawasan norma K3 di 72 perusahaan b. Pemeriksaan uji obyek K3 25 perush c. Pelatihan tanggap darurat 250 perush d. Bintek analis K3 Umum 250 perush	APBD
6. Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penerapan Norma Kelembagaan, Keahlian dan SMK3 50 perusahaan	APBN
7. Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 5258 kasus	APBN
8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan anggaran 46 dokumen b. Layanan Perkantoran 12 bulan	APBN

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 9, adalah sebesar Rp . 5.498.548.932,- atau 87.61 persen dari total pagu sebesar Rp. 6.276.407.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12.39 persen

10	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.44
Pengukuran kinerja sasaran 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	63.97	53.89	84.24	Baik
Rata – rata tingkat capaian			84.24	baik

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun hasil pengukuran dengan kategori **baik**.

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran 10 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender pada indikator kinerja Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terealisasi sebesar 53.89% atau 84.24%.

Tidak tercapaian indikator kinerja ini, apabila dianalisis disebabkan:

- 1) Semakin bertambahnya tenaga kerja perempuan semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita semakin meningkat.
- 2) Banyaknya lulusan SLTA pekerja wanita yang ingin bekerja di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 3) Menurunnya tingkat pendapatan keluarga,
- 4) Banyaknya wanita yang bersekolah dan mengurus rumah tangga

Pencapaian sasaran-10 dilaksanakan program Kelembagaan Pengarus-tamaan Gender dan Anak dengan kegiatan :

Table. 3.45
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Identifikasi data pilah gender bidang ketenagakerjaan yang berbasis gender.	Data pilah dan statisti gender di 35 kab./kota di 80 perusahaan	APBD
2. Desiminasi Teknis Equal Employmen Opportunity (EEO) bagi pekerja perempuan di perusahaan /tempat kerja	Jumlah pengusaha dan pekerja yang memahami pengarasutamaan gender dalam pekerjaan dan jabatan 270 orang	APBD

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-10, adalah sebesar Rp . 254.217.081,- atau 98.15 persen dari total pagu sebesar Rp. 258.900.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.98 persen dari Pagu yang ditentukan

11	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.46
Pengukuran kinerja sasaran 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Katagori
Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)	35.481	32.081	109.58	Sangat Baik
Rata – rata tingkat capaian			109.58	Sangat Baik

Hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, indikator Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur tercapai melebihi target yaitu target 35.481 orang terealisasi 32.081 orang atau 90.42 persen dengan capaian kategori **sangat baik**

Table. 3.47
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Tahun 2015			Target akhir RPJMD th. 2018	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2018)
	2014	Target	capaian	%		
Jumlah Pekerja Anak / jumlah pe-kerja dibawah umur (orang)	33.551	35.481	32.081	109.58	35.331	90.80
Rata-rata tingkat capaian				109.58		90.80

Realisasi kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, jumlah pekerja anak mengalami penurunan dengan turunnya pekerja anak sebesar 4.38 persen. sedangkan rencana capaian kinerja pada akhir Renstra tahun 2013-2018 pada capaian kinerja terhadap capaian indikator

sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak telah memberikan kontribusi yang cukup besar 90.80 persen.

Jumlah pekerja anak di Jawa Tengah masih cukup tinggi sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi adalah :

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Pemindahan anak dilakukan dengan memindahkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke pekerjaan ringan dan sekaligus meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannya ke dunia pendidikan

Melaksanakan penarikan pekerja anak dilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instansi/lembaga terkait dengan Kabupaten/Kota. Antara lain : Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati anak.

Keberhasilan pencapaian sasaran-11 dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan Anak dengan kegiatan :

Table. 3.48

Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
Pencegahan, penanganan dan penanggulangan korban trafficking ketenagakerjaan di Jateng	Jumlah Stakeholder yang diadvokasi tentang upaya pencegahan trafficking bagi 150 orang	APBD
Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA)	a. Jumlah 1 dokumen Rencana Aksi	APBD
	b. Koordinasi dan evaluasi kegiatan PBTAs 60 orang	APBD
	c. Jumlah pekerja anak yang trampil 50 anak	APBD
	d. Jumlah Penarikan pekerja anak dari PBTAs ke dunia pendidikan 120 anak	APBD
Perlindungan Hak Normatif Pekerja Perempuan	Jumlah pembina Nakerwan terbaik yang mewakili Prov. Jateng 15 orang	APBD
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Pelaksanaan Norma Kerja Perempuan dan Anak 144 Perusahaan	APBN

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-11, adalah sebesar Rp . 1.047.973.350,- atau 88.25 persen dari total pagu sebesar Rp. 1.187.550.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11.75 persen dari Pagu yang ditentukan

12	Pengukuran Kinerja Sasaran
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, indikator kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Table. 3.49
Capaian kinerja dengan target RPJMD tahun 2013-2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1. Rasio penduduk me-miliki e-KTP per wajib e-KTP	100%	89.87	89.87	Baik
2. Prosentase penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	55.00	81.37	147.95	
3. Jumlah Kab./ Kota mengoperasikan SIAK	35	35	100	Baik
4. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	40	47.15	117.88	Sangat Baik
5. Prosentase Pen-duduk yang me-miliki Akta Kema-tian	20	49.22	246.10	Sangat Baik
6. Rasio Pasangan yang memiliki Akta Nikah	100	100	100	Baik
Rata – rata tingkat capaian			130.77	Sangat Baik

Hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, indikator **Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil** tercapai 130.77 persen dengan capaian kategori **sangat baik**

Pada indikator per sasaran yang capaiannya melebihi target adalah indikator Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk juga tercapai melebihi target dari target 40 persen dan terealisasi sebesar 47.15 persen atau tercapai sebesar 117.87 persen Namun ada satu indikaor yang capaiannya tidak tercapai yaitu indikatoar Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP tercapai 89.87 persen dari jumlah penduduk wajib e-KTP. Tidak tercapainya target ini di sebabkan beberapa hal :

TKI yang diluar negeri tidak melakukan pelaporan ke dinas Dukcapil kab/kota sehingga datanya masih tercatat di dinas kab/kota dengan tidak diterbitkannya SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri) ; 2) Masih adanya penduduk yang mempunyai data ganda yang tercatat di kab/kota; 3) Orang meninggal dunia tidak dilaporkan, sehingga masih tercatat di dinas kab/kota

Upaya yang akan dilakukan : 1). Menghilangkan anomalisisasi. 2). Melakukan penyisiran dalam perekaman data ktp-el bagi penduduk dengan mobil keliling dengan mendekati lokasi yang belum dijangkau; 3). Melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan; 4) Untuk pencatatan ktp-el bagi pemula dilakukan di sekolah-sekolah; 5) Orang yang menjadi Tenaga Kerja di luar negeri sebelumnya harus melaporkan ke dinas Dukcapil kab/Kota setempat untuk diterbitkan SKPLN

Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan :

Table. 3.50
Nama kegiatan dan keluaran kegiatan tahun 2015

KEGIATAN	OUTPUT	KET
1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah perekaman e-KTP elektronik di 35 Kab/kota b. Jumlah yang memahami bidang Dukcapil dilintas sektor 255 orang c. Jumlah yang memahami bidang Adminduk Capil 245 orang d. Jumlah yang berkomptens dalam hal pelayanan kepengurusan penghayat kepercayaan 293 orang e. Kerjasama lintas sektor di 3 lembaga f. Buku UU No. 24 Tahun 2013 475 buku g. Optimalisasi manfaat KTP elektronik 360 orang h. Pemahaman tentang nikah siri yang tertib administrasi pencatatan sipil 80 orang i. Fasilitasi dokumen dan catatan sipil anak panti asuhan 752 orang 	APBD

KEGIATAN	OUTPUT	KET
2. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	a. cetak buku profil 100 buku b. Konsolidasi data kependudukan 35 orang c. Aplikasi sinergitas basis data 1 paket d. Database pencapil non SIAK dikonfersi ke database pencapil 1 paket e. Pemasangan 20 baleho f. Cetak 1590 Booklet	APBD
3. Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah	a. Jumlah pegawai berkompentensi dibidang register 35 orang b. Jumlah pegawai berkompentensi untuk pelayanan pencapil 35 orang c. Bimtek administrator database SIAK 35 orang d. Bimtek Administrator PPK 110 orang e. Bimtek Ikatan Bidan 110 orang	APBD
4. Pengembangan Administrasi Sistem	Laporan Penyelenggaraan Adminduk	APBN

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik pada Pendidikan Dasar adalah melalui :

- 1) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Kota serta Pusat berkaitan dengan terbatsnya blangko e-KTP dan alat penunjang dalam hal percetakan blangko e-KTP penduduk
- 2) Adanya penambahan jumlah petugas yang melakukan perekaman data di kabupaten / kota
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat khususnya yang ada di pelosok pedesaan arti pentingnya dokumen kependudukan

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 105.6 persen jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2013-2018 pada tahun ke 2 telah memberikan kontribusi sebesar 73.5 persen

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran - 12, pagu anggaran sebesar Rp 16.281.415.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 12.652.140.100 atau 77.71 persen, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22.29 persen

Keberhasilan pencapaian sasaran-12 **Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil** dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :

- 1) Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2) Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi
- 3) Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah
- 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, pada tahun anggaran 2015, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jateng Tahun 2015 sebanyak Rp. 4.982.286.900- atau dicapai 130.77 persen, dari target sebanyak Rp. 3.810.000.000

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015

JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.810.000.000	4.982.286.900	1.172.286.900	130.77
1 Retribusi jasa umum	545.500.000	572.000.000	26.500.000	104.86

JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5
a Retribusi Pelayanan Pendidikan	545.500.000	572.000.000	26.500.000	104.86
2 Retribusi jasa Usaha	2.801.700.000	3.575.467.728	773.767.728	127.62
a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.626.800.000	3.451.667.728	824.867.728	131.38
b Retribusi tempat penginapan / vila	174.900.000	123.800.000	(51.100.000)	70.4
4 Retribusi perizinan tertentu	448.800.000	629.141.700	180.341.700	140.18
5 Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah	14.000.000	205.677.472	191.677.472	1469.12
a Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	14.000.000	8.280.000	189.780.000	1455.57
• Penjualan hasil peternakan	14.000.000	4.280.000	185.780.000	1427.0
• Penjualan hasil perikanan	0	4.000.000	4000.000	
b Pendapatan dari Pengembalian	0	1.897.472	1.897.472	0
c Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pemb. Gaji dan tunjangan	0	1.897.472	1.897.472	0
d Penerimaan lainnya		195.500.000	0	
e Penerimaan lainnya SKPD		0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	3.810.000.000	4.982.286.900	1.172.286.900	130.78
Jumlah PAD Tahun 2015	3.810.000.000	4.982.286.900	1.172.286.900	130.77
Jumlah PAD Tahun 2014	3.500.000.000	4.701.928.867	1.201.928.867	134.34
Selisih	310.000.000	280.358.033		

b. Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 173.070.074.000 yang terdiri dari Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 121.587.630.000. dan APBN sebesar Rp. 51.482.444.000,- dengan rincian :

I. APBD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov.Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 173.070.074.000, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung / gaji Rp. 58.186.501.000
- Belanja langsung Rp. 63.401.129.000
 1. Belanja Pegawai, Rp. 7,018.606.000,-
 2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 45.678.785.000,-
 3. Belanja Modal sebesar Rp. 10.703.738.000,-

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung/gaji sebanyak Rp. 57.062.597.852 (98.07%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 58.186.501.000, sedangkan belanja langsung anggaran sebanyak Rp. 63.401.129.000 direalisasikan sebesar Rp. 58.806.264.336 (92.75%) berikut :

a). Rincian keuangan berdasarkan capaian per sasaran :

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja	15.785.775.000	13.921.929.220	88.19
2	Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja	2.830.921.000	6.081.846.010	92.00
3.	Menurunnya Jumlah penganggur	23.430.552.000	1.7170.817.953	73.28
4	Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhandaerah penempatan	7.593.107.000	4.105.033.887	54.06
5	Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	2.779.564.000	216.496.7340	77.89
6	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	2.885.605.000	2.299.756.916	79.70
7	Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK)	1.101.400.000	1.050.174.850	95.35
8	Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan	2.846.845.000	2.128.351.325	74.76

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
9	Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	6.276.407.000	5.498.548.932	87.61
10	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	258.900.000	254.217.081	98.19
11	Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak	1.187.550.000	1.047.973.350	88.25
12	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	16.281.415.000	12.652.140.100	77.71
13	Meningkatnya profesionalisme aparatur	649.180.000	604.107.357	93.06
14	Meningkatnya cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada penyelenggara pelayanan publik bidang Nakertransdu	30.976.352.000	29.106.518.709	93.96
JML BELANJA LANGSUNG		114.883.573.000	94.608.888.061	93.96
BELANJA TIDAK LANGSUNG		58.186.501.000		

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran bersumber APBD Povinsi untuk membiayai sebanyak 14 sasaran utama terealisasi sebesar Rp. 114.883.573.000,- (93.96%), adanya sisa keuangan sebanyak Rp. 20.274.684.939,- (17.65%),- disebabkan karena :

1) Kegiatan APBD Provinsi

- Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan pada pelatihan penatalaksana calon TKI 100 orang realisasi 84 orang karena tdk ada kewajiban PPTKIS untuk mengikutkan peserta pelatihan di BLKLN Provinsi dan adanya moratorium penempatan TKI ke luar negeri
- Kegiatan Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKSkarena Kurangnya kesiapan LPKS untuk mengikuti akreditasi (mengisi Borang)
- Kegiatan Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan karena adanya pembebanan pembiayaan peserta pelathan, target 25 orang realisasi 11 oarang

- Kegiatan Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Korban Trafficking penempatan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah karena tidak ada korban trafficking dari Jateng
- Kegiatan Pelatihan Transmigrasi karena perubahan Nomenklatur kementerian, target 50 KK/100 orang, tercapai 35KK/70
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pembuatan dokumen Dukcapil anak panti asuhan usia 0-18 tahun tdk memenuhi syarat UU No. 23 tahun 2006 yg dirubah UU No. 24 tahun 2013 (realisasi 752 orang target 1.425 orang)
- Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi karena pembuatan Aplikasi sinergitas basis data tidak dilaksanakan karena data kemis-kinan dari BPS belum di rilis.
- Efisiensi Pelaksanaan Perjalanan Dinas

2) Pelaksanaan kegiatan APBN

- DIPA baru turun pada bulan Agustus 2015 sehingga pelaksanaan kegiatan hanya 4 (empat) bulan
- Adanya berubah an Klomenklatur di Kementrian sehingga kegiatan - kegiatan di Kabupaten / kota tidak sepenuhnya terealisasi 100%

b). Rincian keuangan berdasarkan capaian per Program / kegiatan :

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FSK
A	Program Pengembangan Kesempatan Kerja	5.004.380.000	4.578.328.978	91.49	100
	1. Pembinaan Masyarakat Penganggur Melalui Pengembangan Kewirausahaan	650,000,000	599,187,500	92.18	100
	2. Pelayanan, penempatan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri	2,650,000,000	2,421,893,978	91.39	100
	3. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	588,000,000	560,767,900	95.37	100

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FSK
4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	98,020,000	91,829,000	93.68	100
5. Penyusunan Data-base Ketenagaker-jaan	97,810,000	97,270,500	99.45	100
6. Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKAD	394,500,000	349,073,800	88.49	100
7. Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	373,000,000	314,005,300	84.18	100
8. Penguatan Tata Kelola dan Perencanaan Bid. Nakertransduk	153,050,000	144,301,000	94.28	100
B Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.243.919.000	10.300.653.970	91.61	99.98
1. Pelatihan Kerja bagi CTKI LN	645,000,000	560.322.000	86.87	100
2. Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM	380,680,000	375.383.000	98.61	100
3. Pelatihan dan Pemberdayaan Penca	620,565,000	617.653.500	99.53	100
4. Pemagangan dalam dan luar negeri	400,000,000	387.253.200	96.81	100
5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pelatihan Kerja	300,000,000	248.240.000	82.75	100
6. Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS	350,000,000	323.030.000	92.29	99.33
7. Pengadaan sarana dan prasarana produktivitas	1,842,558,000	1.516.489.200	82.30	100
8. Peningkatan peran dan fungsi BLKP melalui ISO 9001 : 2008	69,320,000	6.7850.000	97.88	100
9. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	475,000,000	407,004,000	85.69	100
10. Pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas	309,430,000	304.196.000	98.31	100
11. Pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industry	751,366,000	656,775,150	87.41	100
12. Pemberdayaan Lembaga Produktivitas	425,000,000	389.099.000	91.55	100
13. Uji Kompetensi, Identifikasi Data Pilah Responsif Gender yang Tersertifikasi dan Data Base Standarisasi dan Sertifikasi	250,000,000	788.949.500	98.10	100

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FSK
14. Peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	425,000,000	229.971.000	96.58	100
15. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau Daerah penghasil bahan baku Industri hasil Tembakau	4,000,000,000	74.534.800	94.79	100
C Program perlindungan dan Pengembangan tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	682.4118.000	6.410.602.441	93.94	99.84
1. Penetapan Upah Minimum	1,101,400,000	1.050.174.850	95.35	100
2. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	587,475,000	585.163.300	99.61	100
3. Penanganan Kasus Kecelakaan Kerja /Jamsostek dan Penempatan TKI	133,200,000	131.292.200	98.57	100
4. Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri	378,700,000	378.113.066	99.85	100
5. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/ SB	194,000,000	184.610.100	95.16	100
6. Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jamsos	151,800,000	140.170.575	92.34	100
7. Pembinaan syarat kerja dan Jaminan Sosial di dalam dan di luar Hubungan Kerja	280,980,000	228.035.500	81.16	100
8. Pengujian lingkungan sektor industri, ambient dan emisi stack	1,786,760,000	1.549.106.616	86.70	100
9. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan	234,285,000	223,141,642	95.24	95.32
10. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja di Sektor Industri.	245,800,000	244,215,192	99.36	100
11. Pengembangan dan Akreditasi Laboratorium BPPKH Prov. Jateng	74,400,000	62,447,450	83.93	100
12. Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	239,950,000	238,407,000	99.36	100
13. Forum koordinasi LKS Tripartite	503,028,000	490,374,950	97.48	100
14. Penyelesaian PHI / PHK /Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan	220,650,000	220,596,000	99.98	100

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FSK
15. Pemanjapan eksis-tensi lembaga / UPTD	90,000,000	88,436,400	98.26	100
16. Penyelesaian kasus TKI bermasalah	127,650,000	127,050,000	99.53	100
17. Pengembangan data base kasus ketenagakerjaan	105,700,000	105,268,000	99.59	100
18. Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	170,575,000	170,526,000	99.97	100
19. Peningkatan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Pekerja	197,765,000	193,473,600	97.83	100
D Program Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	258,900,000	254,217,081	98.19	100
1. Identifikasi data pilah gender bidang ketenagakerjaan yang berbasis gender.	67,000,000	65,988,575	98.49	100
2. Desiminesi teknis Equal Employment Opportunity (EEO) di Perusahaan / tempat kerja	191,900,000	188,228,506	98.09	100
E Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan Anak	1,065,200,000	931,968,600	87.49	96.06
1. Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Korban Trafficking penempatan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah	116,000,000	67,355,800	58.07	63.79
2. Perlindungan HAK Normatif Pekerja Perempuan	72,000,000	69,661,000	96.75	100
3. Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA)	877,200,000	794,951,800	90.62	100
F Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	870,000,000	698751418	89.07	97.33
1. Pelatihan Transmigrasi	160,000,000	124.315.400	78.44	85.47
2. Penyiapan, Penempatan dan Pemanjapan Transmigrasi	550,000,000	458.274.800	89.13	100
3. Pemantauan Transmigrasi Pasca Penempatan	160,000,000	116.161.218	99.50	100
G Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,709,080,000	2,390,545,700	88.24	100
1. Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,335,160,000	1,183,768,800	88.66	100

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FSK
	2. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	777,270,000	694,919,000	89.41	100
	3. Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah	596,650,000	511,857,900	85.79	100
H	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,465,123,000	11,622,143,864	93.27	100
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.245.429.000	17,273,299,845	94.67	100
J	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	265,800,000	211,075,000	79.41	100
K	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	649,180,000	604,107,357	93.06	100
L	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	3.800.000.000	3,454,388,700	90.90	98.98
	Belanja langsung	63,401,129,000	58,806,264,336	92.75	99.65
	Belanja tidak langsung	58,186,501,000	57,062,597,852	98.07	
	Jumlah	121,587,630,000	115,868,862,188	95.30	

II. APBN

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan yang berasal dari APBN tahun 2015 yang berasal dari dana dekonsentrasi dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan 8 program dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 51,482,444,000,- dan terealisasi sebanyak Rp. 35.802.623.725 (69.54%) sedangkan realisasi fisik sebesar (89.62%) rincian adalah :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
	DEKONSENTRASI	44,759,337,000	32,472,522,638	72.55	80.90
A	Program Penempatan dan Pemberdayaan	18.426.172.000	12.592.488.975	68.34	80.90
	1. Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri	926.890.000	610.390.234	65.65	89.89
	2. Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	2.508.906.000	146.237.750	5.83	87.50

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
	3.Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	603.476.000	271.855.900	45.05	70.84
	4.Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	11.460.694.000	1.001.8951.130	87.42	94.59
	5.Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	2.449.033.000	1.184.582.101	48.37	100
	6.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	477.173.000	360.471.860	75.54	100
B	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamin-an Sosial Tenaga Kerja	5.718.016.000	3.896.722.190	68.15	84.40
	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemas-yarakatan Hubungan Industrial	1.992.536.000	1.401.545.890	70.34	90.23
	2. Peningkatan Penerapan Pengupahan Jaminan Sosial Tenaga kerja	194.743.000	154.375.900	79.27	100
	3. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselesihan Hubungan Industrial	1.509.180.000	928.504.650	61.52	70.05
	4. Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	439.731.000	297.481.150	67.65	100
	5. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.470.026.000	1.038.516.100	70.65	83.33
	6. Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	111.800.000	76.298.500	68.25	100
C	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	3,470,037,000	2,950,479,482	85.03	90.01
	1. Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2,428,802,000	2,068,640,908	85.17	85.99

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
	2. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	122,350,000	116,004,750	94.81	94.81
	3. Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	48,978,000	48,516,980	99.06	100
	4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	869,907,000	717,316,844	82.46	100
D	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	3,572,777,000	2,771,237,591	77.57	100
	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	164,126,000	159,598,741	97.24	100
	2. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	28,600,000	27,500,000	96.15	100
	3. Peningkatan penyelenggaraan Pemasangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	3,007,576,000	2,230,332,450	74.16	100
	4. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	372,475,000	353,806,400	94.99	100
E	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13,572,335,000	10,261,594,400	75.61	98.21
	1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	13,572,335,000	10,261,594,400	75.61	98.21
TUGAS PEMBANTUAN		6,723,107,000	3,330,101,087	49.53	67.98
A	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	6,600,639,000	3,236,509,487	49.03	66.42
	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKP2T	462,454,000	292,899,100	63.34	69.47
	2. Penataan Persebaran Penduduk	5,387,835,000	2,346,550,487	43.55	61.48
	3. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	750,350,000	597,059,900	79.57	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
B	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	122,468,000	93,591,600	76.42	85.83
	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKT	122,468,000	93,591,600	76.42	85.83
JUMLAH		51,482,444,000	35,802,623,725	69.54	89.62

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Tengah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan mempunyai fungsi memberikan fasilitasi / pelayanan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan pencatatan sipil. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (sangat baik) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2015 sebesar **106.74 persen** berarti kategori sangat baik, adapun rincian per sasaran adalah 1). Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, tercapai 142.68 persen, dengan kategori **sangat baik**. sasaran 2) Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja tercapai sebesar 115.63 persen dengan kategori **sangat baik**, Sasaran 3). Menurunnya Jumlah penganggur mencapai sebesar 95.02 persen masuk kategori **baik**. Sasaran 4) Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan mencapai 79.53 persen masuk kategori **baik** sasaran-5). adalah Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan terealisasi 100.14 persen masuk kategori **sangat baik**, sasaran 6). Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial capaian sasaran sebesar 112.99 persen dengan

kategori **sangat baik**, sasaran sasaran 7). adalah Meningkatnya Upah Minimum Kab./Kota (UMK) capaian sasaran sebesar 109.08 persen dengan kategori **sangat baik**, sasaran 8). Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan rata-rata capain sebesar 109.08 persen dengan kategori **sangat baik**, sasaran 9).Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan rata-rata capain sebesar 93.22 persen dengan kategori **baik** sasaran 10). Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender rata-rata capain sebesar 109.58 persen dengan kategori **sangat baik**, sasaran 11). Meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak rata-rata capain sebesar 109.58 persen dengan kategori **sangat baik**, sasaran 12). Sasaran Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil rata-rata capain sebesar 114.8 persen dengan kategori **sangat baik**.

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Thn 2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jateng sebesar Rp. 4.982.286.900 atau 130.78 persen dari target Rp. 3.810.000.000,-, jika dibandingkan Tahun 2014 penerimaan PAD sebesar Rp. 4.701.928.867, maka terjadi kenaikan PAD sebanyak Rp. 280.358.033 atau (8.01%).
- c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah memperoleh anggaran sebesar Rp. 173.070.074.000 jumlah tersebut terdiri dari anggaran APBN sebesar Rp. 51.482.444.000 (29.75 persen) dan APBD Povinsi sebesar Rp. 114.883.573.000 (70.25 persen) terbagi belanja tidak langsung 50.65 persen dan belanja langsung 55.19 persen. Dari total tersebut diperuntukan membiayai 12 sasaran utama adapun realisasi sebesar 151.671.485.913,- (87.64%), sedangkan realisasi fisik sebesar 95.15 persen. Tidak tercapainya realisasi fisik 100 persen karena :
- Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan pada pelatihan penatalaksana calon TKI 100 orang realisasi 84 orang karena tidak ada kewajiban PPTKIS untuk mengikutkan peserta pelatihan di BLKLN Provinsi dan adanya moratorium penempatan TKI ke luar negeri

- Kegiatan Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS karena Kurangnya kesiapan LPKS untuk mengikuti akreditasi (mengisi Borang)
- Kegiatan Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan karena adanya pembebanan pembiayaan peserta pelatihan, target 25 orang realisasi 11 orang
- Kegiatan Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Korban Trafficking penempatan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah karena tidak ada korban trafficking dari Jateng
- Kegiatan Pelatihan Transmigrasi karena perubahan Nomenklatur kementerian, target 50 KK/100 orang, tercapai 35KK/70
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pembuatan dokumen Dukcapil anak panti asuhan usia 0-18 tahun tdk memenuhi syarat UU No. 23 tahun 2006 yg dirubah UU No. 24 tahun 2013 (realisasi 752 orang target 1.425 orang)
- Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi karena pembuatan Aplikasi sinergitas basis data tidak dilaksanakan karena data kemiskinan dari BPS belum di rilis.
- Efisiensi Pelaksanaan Perjalanan Dinas
- DIPA baru turun pada bulan Agustus 2015 sehingga pelaksanaan kegiatan hanya 4 (empat) bulan
- Adanya perubahan Nomenklatur di Kementerian sehingga kegiatan - kegiatan di Kabupaten / kota tidak sepenuhnya terealisasi 100%.

B. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Jumlah penganggur di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 963.783 orang atau 4.99 persen dari total angkatan kerja sebesar 17.30 juta penduduk sebagian besar penganggur berusia muda antara 15–29 tahun dan mayoritas berpendidikan SD sampai dengan SMP.

2. Pada Agustus 2015, penduduk yang bekerja di Jawa Tengah masih tetap didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 52,38 persen, sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan sarjana ke atas hanya sebesar 7,71 persen
3. Belum seimbang antara jumlah pencari kerja sejumlah 345.832 orang sedangkan ditempatkan tercatat 255.568 tenaga kerja.
4. Banyak kasus TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap.
5. Pelaksanaan hubungan industrial masih mengalami persoalan, seperti tuntutan para pekerja untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja yang memadai. Di sisi lain, para pengusaha mengharapkan produktivitas yang tinggi dari pekerja. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan ketegangan antara pekerja dan pemberi kerja
6. Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih relative besar. Lapangan kerja formal telah bertambah secara perlahan terpengaruh oleh dampak krisis ekonomi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya untuk melakukan restrukturisasi usaha akibat turunnya permintaan produk oleh pasar dunia.
7. Pelayanan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri masih belum optimal. Hal itu terlihat oleh banyaknya kasus yang dihadapi oleh TKI Permasalahan di dalam negeri masih saja berfokus pada masalah mendasar, yaitu pencatatan kependudukan, percaloan / sponsor, persiapan dan pembekalan pemberangkatan, keimigrasian, pelatihan dan sertifikasi, serta pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, masalah di luar negeri terkait dengan masih rendahnya upaya perlindungan terhadap TKI yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal
8. Belum harmonisnya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang sering terjadi aksi unjuk rasa
9. Rendahnya kualitas angkatan kerja berkaitan dengan ketrampilan kerja yang dimiliki
10. Kurangnya pemahaman tentang peraturan undang – undang ketenagakerjaan oleh para pekerja.

11. Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan pekerja anak. Saat ini sekitar 33.551 pekerja anak
12. lokasi dan jumlah untuk penempatan transmigran terbatas tidak sebanding dengan animo transmigrasi yang cukup banyak sejumlah 1.109 KK
13. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
14. Program e-KTP belum di pahami oleh masyarakat dalam pendataan tertib administrasi dalam rangka kepemilikan KTP jumlah penduduk yang telah melaksanakan perekaman data tercatat 89.87 persen.

C. PEMECAHAN MASALAH

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan agar agar tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan kompetensi yang mampu bersaing di pasar kerja.
2. Balai-balai pelatihan kerja yang ada di Dinas Nakertransduk Provinsi Jateng di tingkatkan dan didorong menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Serta melaksanakan kerjasama kerjasama dengan balai-balai pelatihan kerja swasta di kabupaten/kota agar balai pelatihan kerja dapat berfungsi sebagai balai pelatihan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri dan UMKM
3. Meningkatkan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi serta memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja untuk menjamin tercapainya standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
4. Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana pelatihan, peremajaan peralatan pelatihan, diklat instruktur, pengembangan standar kompetensi kerja nasional, dan peningkatan kualitas manajemen BLK. Salah satu hasil terpenting revitalisasi BLK,

adalah renovasi bangunan BLK dan pengadaan peralatan pelatihan berbasis kompetensi

5. Memfasilitasi para pencari kerja memperoleh akses informasi pasar kerja, telah dibangun pusat-pusat informasi dan bursa kerja terus dioptimalkan. Pusat layanan informasi itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Beberapa pusat informasi pelayanan ketenagakerjaan yang sudah dibangun di 35 kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang berhasil ditempatkan lebih dari 329.605 orang melalui antarkerja lokal (AKL) dan Antar kerja antardaerah (AKAD) serta antar Antar Negara (AKAN) serta BKK, JMF, BKO
6. Pemberdayaan masyarakat melalui pengonsolidasian program-program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja terutama kegiatan penanggulangan penganggur yang dapat memberi peluang pekerjaan yang dilakukan melalui program dan kegiatan.
7. menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri dimulai sejak rekrutmen, penempatan, dan kembali ke tanah air.
8. Pengembangan sistem jaringan informasi, penempatan, perlindungan dengan pemantauan TKI dengan instansi terkait
9. Memberi pelayanan penempatan TKI Deportasi khususnya di sejumlah wilayah perbatasan sekaligus mengantisipasi deportasi TKI illegal
10. Penyebarluasan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan bagi kalangan perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat luas
11. penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dengan jumlah ter-PHK pada tahun 2015 mencapai 869 orang
12. perbaikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) seluruh Jawa Tengah dalam upaya pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL),
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai pengawas ketenagakerjaan

14. pembentukan komite aksi dan rencana aksi untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak di 35 Kab./Kota yang dapat mencegah anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk sebanyak 33.551 anak
15. Peningkatan jumlah kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dari jumlah 22.630 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.269.184 orang
16. Memperkuat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam rangka mendorong tercapainya pelaksanaan perundingan secara “*bipartit*” antara serikat pekerja dan pemberi kerja. Upaya ini dimaksudkan agar berbagai perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja yang diselesaikan pada tingkat bipartit, tanpa campur tangan Pemerintah. Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan agar dapat mendorong pelaksanaan kualitas hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya perselisihan bahkan lebih luas lagi sering terjadinya pemogokan pekerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Semarang, 2016

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. WIKA BINTANG. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19590711 198603 2 006

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN

Lampiran 1

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Jumlah Penempatan tenaga kerja AKAN 2. Jumlah Penempatan tenaga kerja AKAL 3. Jumlah Penempatan tenaga kerja AKAD 4. Jumlah Penempatan tenaga kerja melalui JMF, BKO, dan BKK 5. Jumlah Penempatan tenaga kerja Transmigrasi 6. Jumlah Penempatan tenaga kerja pasca Pelatihan di BLK	40.000 naker 33.145 naker 14.500 naker 8.000 naker 920 KK 93.435 naker	106.851 nak 96.173 nake 22.930 nake 103.683 nak 690 KK 100.079 nak
Rata-rata capaian sasaran-1				
2	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan berkompotensi	1. Jumlah tenaga kerja terdidik 2. Jumlah tenaga kerja yang mempunyai kompetensi	581.954 naker 91.935 naker	509.839 na 98.319 nak
Rata-rata capaian sasaran-2				
3	Dst...nya.....	1. 2.		
Rata-rata capaian sasaran-3				
Total Rata-rata capaian sasaran (1+2+3)				

Lampiran 2

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN

No	Jenis Blnj	Program	Kgt	Jml Anggaran	Realisasi
A	Belanja Langsung	1. Pengemb	- Bintek Pembuatan	Rp.150 Juta	Rp.150 Juta

		Agrobisnis.	Pupuk Organik		
			- Bintel Penanaman tupang sari	Rp.100 juta	Rp.99 Juta
		2. Ketahanan Pangan	- Bintel sistem penyimpanan	Rp.300 Jt	Rp.299 jt
		3. Dst...nya	-	-	-
Jumlah A dan rata-rata % A				Rp.550 Jt	Rp.548 Jt
B	Belanja Tidak Langsung	1. Pelayanan Adm Perkantoran	- Pelayanan Surat menyurat	Rp.75 juta	Rp.75 juta
			- Pengadaan ATK	Rp.100 Juta	Rp.100 Juta
		2. Dst.....nya			
Jumlah B dan rata-rata % B				Rp.175 Jta	Rp.175 Jta
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)				Rp.725 Jta	Rp.723 Jta

- Bintel Pembuatan Pupuk Organik	Rp.150 Juta	Rp.150 Juta
- Bintel Penanaman tupang sari	Rp.100 juta	Rp.99 Juta
- Bintel sistem penyimpanan	Rp.300 Jt	Rp.299 jt